

SKRIPSI

**PENERAPAN PSAK NOMOR 45 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN
ORGANISASI NIRLABA PADA RUMAH SAKIT BERSTATUS
BADAN LAYANAN UMUM
(Studi Kasus di RSUD Prof. Dr. A Makkatutu Kab. Bantaeng)**

NURIFDA ZAKINA

105730449513



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2017

SKRIPSI

**PENERAPAN PSAK NOMOR 45 TENTANG PELAPORAN
KEUANGAN ORGANISASI NIRLABA PADA RUMAH
SAKIT BERSTATUS BADAN LAYANAN UMUM
(Studi Kasus di RSUD Prof. Dr. A Makkatutu Kab. Bantaeng)**

NURIFDA ZAKINA

105730449513

Diajukan untuk Memenuhi Salah satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN PSAK NOMOR 45 TENTANG
PELAPORAN KEUANGAN ORGANISASI
NIRLABA PADA RUMAH SAKIT BERSTATUS
BADAN LAYANAN UMUM

NAMA MAHASISWA : NURIFDA ZAKINA

NOMOR STAMBUK : 105730 4495 13

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

JENJANG STUDI : STRATA SATU (S-1)

PERGURUAN TINGGI : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diajukan didepan panitia penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Sabtu, 07 Oktober 2017 pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 07 Oktober 2017

Pembimbing I

Jamaluddin M, SE., M.Si
NBM : 821 390

Pembimbing II

Sitti Zulaeha, S.Pd., M.Si
NIDN : 0919118704

Mengetahui,

Ismail Rosulung, SE., MM
NBM : 903 078

Ketua Jurusan Akuntansi

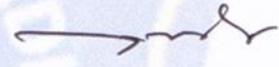
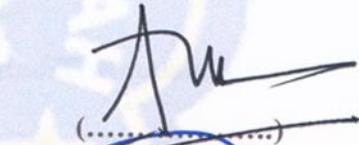
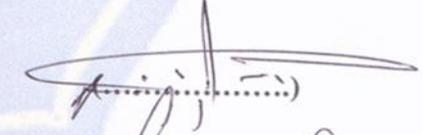
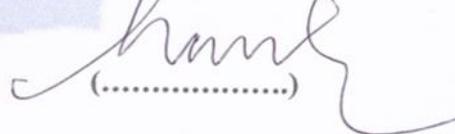
Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak. CA
NBM. 1073428

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Atas Nama NURIFDA ZAKINA, Nim 105730449513 Ini Telah Diperiksa Dan Diterima Oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : Tahun 1439 H/2017 M Dan Telah Di Pertahankan Didepan Penguji Pada Hari Sabtu, 07 Oktober 2017 M. Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 17 Muharram 1439 H
07 Oktober 2017 M

Panitia Ujian :

1. Pengawas Umum: Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM 
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM 
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Drs. H. Sultan Sarda, MM 
(WD. 1 Fak. Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : a. Dr. H. Ansyarif Khalid, SE., M.Si., Ak. CA 
b. Ismail Rasulong, SE., MM 
c. Faidhul Adziem, SE., M.Si 
d. Drs. H. Hamzah Limpo, MS 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain) dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”

(Q.S Al-Insyirah,6-8)

“Jangan mundur sebelum melangkah, setelah melangkah jalani dengan cara terbaik yang bisa kita lakukan”

“Sesuatu akan menjadi kebanggan, jika sesuatu itu dikerjakan, dan bukan hanya dipikirkan.

Sebuah cita-cita akan menjadi kesuksesan, jika kita awali dengan bekerja untuk mencapainya. Bukan hanya menjadi impian”

Kupersembahkan karyaku buat:

1. Ayahanda Arifuddin dan ibunda Tercinta ST. Ramlah
2. Sahabat seperjuangan akuntansi 10-13
3. Almamater tercinta
4. Dan khususnya kampus biru kebanggaanku Universitas Muhammadiyah Makassar

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah member rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah saw, beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya.

Segala usaha dan upaya telah dilakukan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik serta koreksi dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan akan penulis terima dengan lapang dada.

Terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Dr. H. Rahman Rahim., SE., MM Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong., SE., MM Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ismail Badollahi,SE,M.Si.Ak.CA Selaku ketua jurusan
4. Jamaluddin M,SE,M.Si Selaku Pembimbing I
5. Sitti Zulaeha,S.Pd,M.Si Selaku Pembimbing II

6. Orang tua penulis, Ayahanda Arifuddin dan Ibunda ST. Ramlah yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayangnya serta keikhlasan dalam membesarkan, mendidik dan membiayai penulis serta doa restu yang tak henti-hentinya untuk keberhasilan penulis.
7. Sahabat-sahabatku (Rosdiana SE, Dian Apriyani SE, Nurrahmah SE, Fitrianti SE, Nurfurqani SE, dan Ulfi Mahdiana) dan teman-teman seperjuangan Jurusan Akuntansi Unismuh angkatan 2013 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu atas segala bantuan, canda tawa dan kebersamannya dalam melewati masa perkuliahan yang tidak singkat.
8. Sahabat-sahabatku yang dijuluki “SAHABAGGG” (eka, nana, endah, fitri, iin, icha, tuty, rahmat, irsan, isman, dan edi) yang selalu menemani saat suka dan duka, dan memberikan hiburannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam penyajian maupun penyusunannya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik yang membangun serta saran dari semua pihak demi kesempurnaan karya selanjutnya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pihak yang membacanya, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, Juli 2017

Penulis

ABSTRAK

NURIFDA ZAKINA. 2013. PENERAPAN PSAK NOMOR 45 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN ORGANISASI NIRLABA PADA RUMAH SAKIT BERSTATUS BADAN LAYANAN UMUM (Studi Kasus di RSUD Prof. Dr. A Makkatutu Kab. Bantaeng). Dibimbing oleh Jamaluddin M dan Sitti Zulaeha.

Paradigma baru pengelolaan keuangan Negara setidaknya mengandung tiga kaidah manajemen keuangan negara, yaitu: orientasi pada hasil, profesionalitas, dan akuntabilitas-transparansi. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU yang mewajibkan akuntansi dan pelaporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia. Berdasarkan kesamaan karakteristik yang dimiliki BLU, maka standar akuntansi yang sesuai adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 tentang Pelaporan Keuangan untuk Organisasi Nirlaba. Apakah PSAK No. 45 dapat diterapkan secara penuh pada laporan keuangan BLU?

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif untuk mengetahui komparatif objek penelitian yaitu Pelaporan Keuangan BLU RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu Bantaeng dengan PSAK No. 45, Pedoman Akuntansi Rumah Sakit Pemerintah, dan Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran. Analisis kuantitatif digunakan untuk mengetahui besarnya perbedaan yang timbul.

Hasil analisis kualitatif menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan untuk 8 indikator yang digunakan. Hasil analisis kuantitatif menunjukkan tidak ada perbedaan perhitungan antara laporan keuangan RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu Bantaeng dengan PSAK No. 45. Dapat diambil kesimpulan, PSAK No. 45 dapat diterapkan secara penuh pada laporan keuangan BLU khususnya rumah sakit.

Kata kunci: laporan keuangan badan layanan umum, psak no. 45, organisasi nirlaba.

ABSTRACT

NURIFDA ZAKINA. 2013. APPLICATION OF PSAK NUMBER 45 ABOUT REPORTING THE NIRLABA ORGANIZATION HANDLING ON HOUSE SAKITBERSTATUS AGENCY OF GENERAL SERVICES (Case Study at RSUD Prof. Dr. A Makkatutu Kab. Bantaeng). Guided by Jamaluddin M and Sitti Zulaeha.

The new paradigm of State financial management at least contains three rules of financial management of the country, namely: the orientation of the results, professionalism, and accountability-transparency. The government issued Government Regulation (PP) No.23 of 2005 on Financial Management BLU which requires BLU accounting and financial reporting held in accordance with the published Financial Accounting Standards by the association of the Indonesian accounting profession. Based on similarity characteristics owned by BLU, the appropriate accounting standard is Statement Financial Accounting Standards (PSAK) No. 45 on Financial Reporting for Nonprofits. What is PSAK No. 45 can be applied on a regular basis full on BLU financial statements?

The research method used is descriptive qualitative with qualitative analysis and quantitative analysis. Qualitative analysis to know comparative object of research that is Financial Reporting BLU RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu Bantaeng with PSAK No. 45, Guidelines Accounting for Government Hospitals, and Guidelines for Planning Business and Budget. Quantitative analysis is used to know the magnitude of the differences that arise.

The results of qualitative analysis show no differences significant for the 8 indicators used. Quantitative analysis results show no difference of calculation between RSUD financial report Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu Bantaeng with PSAK No. 45. Can taken conclusion, PSAK No. 45 can be fully applied to reports BLU finances, especially hospitals.

Keywords: financial statements of public service agencies, no. 45, organization non-profit.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Standar Akuntansi Keuangan.....	10
B. Organisasi Nirlaba.....	11
a. Pengertian Organisasi Nirlaba.....	11
b. Karakteristik Organisasi Nirlaba.....	12

c. Standar Akuntansi Keuangan Organisasi Nirlaba.....	13
C. Badan Layanan Umum.....	21
a. Pengertian Badan Layanan Umum.....	21
b. Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum	24
c. Landasan Hukum Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.....	24
d. Rumah Sakit Pemerintah Berstatus Badan Layanan Umum.....	26
D. Penelitian Terdahulu	27
E. Kerangka Pemikiran.....	41
F. Hipotesis.....	43

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	36
B. Jenis dan Sumber Data	36
C. Populasi dan Sampel	37
D. Metode Pengumpulan Data	37
E. Definisi Operasional Variabel.....	39
F. Metode Analisis.....	40

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Gambaran Singkat Rumah Sakit.....	42
B. Tugas Pokok dan Fungsi	44
C. Visi dan Misi Rumah Sakit	45
D. Keadaan Pegawai, Sarana/Prasarana Dan Pembiayaan.....	46
E. Struktur Organisasi dan Job Description	53

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Siklus Transaksi Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu KAbupaten Bantaeng	62
B. Bagan Perkiraan Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng	63
C. LaporanKeuanganRumahSakitUmum DaerahProf.Dr.H.M.AnwarMakkatutuKabupatenBantaeng	69
D. EvaluasiPenerapan PSAK No. 45 PadaRumahSakitUmum Daerah Prof.Dr.H.M.AnwarMakkatutuBantaeng	76

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA	75
-----------------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN	78
--------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Maping Penelitian terdahulu	29
Tabel 2.2	Maping Jurnal Penelitian Terdahulu	31
Tabel 4.3	Daftar Pegawai RSUD Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan.....	47
Tabel 4.4	Teknis Pekerjaan	49
Tabel 4.5	Pembiayaan	52
Tabel 5.6	Perkiraan Akun.....	64
Tabel 5.7	Pengaruh Transaksi Pada Perkiraan	69
Tabel 5.8	Neraca RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu	71
Tabel 5.9	Laporan Aktivitas RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu	73
Tabel 5.10	Laporan Arus Kas.....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Gambar Kerangka Pikir Penelitian	35
Gambar 4.2	Gambar Struktur Organisasi RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang saat ini sedang mengalami permasalahan di berbagai sektor khususnya sektor ekonomi. Upaya yang telah dilakukan untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari berdirinya badan usaha yang ada di Indonesia. Kenyataannya pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang sekarang ini belum mampu menyelesaikan permasalahan ekonomi yang ada dalam masyarakat luas. Situasi permasalahan itulah yang mendasari masyarakat untuk hidup dalam berorganisasi. Banyak bentuk organisasi dalam kalangan masyarakat salah satunya bergerak dalam bidang sosial yang dikenal dengan istilah organisasi nirlaba.

Organisasi nirlaba atau organisasi *non profit* adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba. Organisasi nirlaba meliputi gereja, sekolah negeri, derma publik, rumah sakit dan klinik publik, organisasi politis, bantuan masyarakat dalam hal perundang-undangan, organisasi jasa sukarelawan, serikat buruh, asosiasi profesional, institut riset, museum, dan beberapa petugas pemerintah. Perencanaan organisasi sangat penting dilakukan untuk mengantisipasi keadaan di masa yang akan datang. Bagi tiap-tiap jenis organisasi, sistem

perencanaan berbeda-beda tergantung pada tingkat ketidakpastian dan kestabilan lingkungan yang mempengaruhi. Semakin tinggi tingkat ketidakpastian dan kestabilan lingkungan yang dihadapi organisasi, maka diperlukan sistem perencanaan yang semakin kompleks dan canggih.

Di zaman modern ini transparansi dan akuntabilitas merupakan harapan setiap pengguna laporan keuangan. Transparansi dan akuntabilitas diperlukan agar pengguna laporan keuangan dapat mengerti kondisi dari perusahaan dan dapat menilai kinerja dari suatu perusahaan. Melalui penyajian informasi yang transparan dan akuntabel pengguna laporan keuangan dapat ikut serta mengawasi kinerja perusahaan sehingga bisa meminimalisir kemungkinan kecurangan yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen.

Layaknya perusahaan, transparansi dan akuntabilitas dalam organisasi nirlaba sangat diperlukan. Pertanggungjawaban kinerja organisasi nirlaba diharapkan transparan dan akuntabel agar para pemberi sumber daya dapat memastikan bahwa sumber daya yang diberikan digunakan sebagaimana mestinya. Pimpinan organisasi nirlaba diharapkan mampu menjawab permasalahan yang berkaitan dengan akuntabilitas, skandal yang terjadi dalam internal organisasi, pertanyaan dari masyarakat atau pendonor yang ingin tahu penggunaan dana yang diberikan dan tuntutan pertanggung jawaban dari pemerintah.

Paradigma baru pengelolaan keuangan negara sesuai dengan paket peraturan perundang-undangan dibidang keuangan negara meliputi

Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum setidaknya mengandung tiga kaidah manajemen keuangan negara, yaitu: orientasi pada hasil, profesionalitas, dan akuntabilitas – transparansi. Yang semuanya itu bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik oleh pemerintah.

Paradigma ini dimaksudkan untuk memangkas ketidakefisienan. Memang menjadi persepsi masyarakat bahwa pemerintah selama ini dinilai sebagai organisasi yang birokratis, lambat, tidak efektif, dan tidak efisien. Padahal dalam manajemen unit pemerintahan harus profesional, akuntabel dan transparan. Rumah sakit sebagai salah satu jenis Badan Layanan Umum merupakan ujung tombak dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Namun, tidak sedikit keluhan selama ini di arahkan pada kualitas pelayanan rumah sakit yang dinilai masih rendah. Perkembangan pengelolaan rumah sakit baik dari aspek manajemen, maupun operasional sangat dipengaruhi oleh berbagai tuntutan dari lingkungan, yaitu antara lain bahwa rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan biaya pelayanan kesehatan terkendali sehingga akan berujung pada kepuasan pasien. Tuntutan lainnya adalah pengendalian biaya. Pengendalian biaya merupakan masalah yang kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai pihak yaitu mekanisme pasar, tindakan ekonomis, sumber daya manusia yang dimiliki (*profesionalitas*) dan yang

tidak kalah penting adalah perkembangan teknologi dari rumah sakit itu sendiri.

Rumah sakit pemerintah yang terdapat ditingkat pusat dan daerah tidak lepas dari pengaruh perkembangan tuntutan tersebut. Dipandang dari segmentasi kelompok masyarakat, secara umum rumah sakit pemerintah merupakan layanan jasa yang menyediakan untuk kalangan menengah ke bawah, sedangkan rumah sakit swasta melayani masyarakat kelas menengah ke atas. Biaya kesehatan cenderung terus meningkat, dan rumah sakit dituntut untuk secara mandiri mengatasi masalah tersebut. Peningkatan biaya kesehatan menyebabkan fenomena tersendiri bagi rumah sakit pemerintahan karena rumah sakit pemerintah memiliki segmen layanan kesehatan untuk kalangan menengah ke bawah. Akibatnya rumah sakit pemerintah diharapkan menjadi rumah sakit yang murah dan bermutu.

Pemerintah memiliki peranan yang sangat penting. Ditinjau dari *mechanic view* pemerintah sebagai regulator dan sebagai administrator, sedangkan dari *organic view* pemerintah berfungsi sebagai *publik service agency* dan sebagai investor. Peranan sebagai regulator dan administrator erat sekali kaitannya dengan birokrasi sedangkan sebagai agen pelayan masyarakat dan sebagai investor harus dinamis dan dapat ditransformasikan menjadi unit yang otonom. Pola transformasi fungsi tersebut dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu *rightsizing (cut the government)*, *corporatization*, dan *privatization*. Namun tidak semua

kegiatan pemerintah bisa ditransformasikan sebagai unit yang otonom dengan pola di atas. Transformasi fungsi kegiatan sebagai unit yang otonom dapat dilakukan pada berbagai kegiatan, antara lain: kegiatan pelayanan pendidikan, kesehatan masyarakat, administrasi kependudukan, pengolahan data, administrasi kendaraan, pengelolaan dana bergulir, pembinaan olahraga, pemeliharaan jalan, pemungutan pajak dan retribusi, pembinaan calon tenaga kerja, pertamanan dan kebersihan. Sementara itu kegiatan yang tidak bisa ditransformasikan sebagai unit yang otonom antara lain: kegiatan legislasi, pengaturan (regulasi), penetapan kebijakan pelayanan, penganggaran, peradilan, penindakan, dan pertanggungjawaban.

Bermula dari tujuan peningkatan pelayanan publik tersebut diperlukan pengaturan yang spesifik mengenai unit pemerintahan yang melakukan pelayanan kepada masyarakat yang saat ini bentuk dan modelnya beraneka macam. Sesuai pasal 1 angka 23 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan:

“Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk. Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas”

Pengertian ini kemudian diadopsi kembali dalam pasal 1 angka 1 PP No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Tujuan dibentuknya BLU adalah sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 68 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2004, yang menyebutkan bahwa “Badan Layanan Umum dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Kemudian ditegaskan kembali dalam PP No. 23 Tahun 2005 sebagai peraturan pelaksanaan dari asal 69 ayat (7) UU No. 1 Tahun 2004, Pasal 2 yang menyebutkan bahwa “BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat”.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU pasal 26 ayat (2) yang berbunyi :

“Akuntansi dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia”

Maka standar akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan rumah sakit adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Standar

pelaporan dibuat dengan tujuan agar laporan keuangan organisasi nirlaba dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi dan memiliki daya banding yang tinggi. Laporan keuangan organisasi nirlaba meliputi:

1. Laporan Posisi Keuangan
2. Laporan Aktivitas
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan atas Laporan Keuangan

Berdasar uraian diatas dan mengingat pentingnya menyusun dan menyajikan laporan keuangan organisasi nirlaba bagi *stakeholder* maka penulis dalam penyusunan laporan skripsi mengambil judul: **“Penerapan PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba pada Rumah Sakit Berstatus Badan Layanan Umum (Studi kasus pada RSUD Prof. Dr. A Makkatutu Kabupaten Bantaeng)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah yang timbul adalah:

“Bagaimana penerapan PSAK nomor 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba pada rumah sakit berstatus Badan Layanan Umum pada RSUD Prof. A Makkatutu ?”.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penerapan PSAK nomor 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba pada

rumah sakit berstatus Badan Layanan Umum pada RSUD Prof. A Makkatutu.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas. Maka manfaat yang dapat diperoleh, antara lain:

1. RSUD Prof. Dr. A Makkatutu Kabupaten Bantaeng berstatus Badan Layanan Umum:
 - a. Sebagai dasar penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 dan PSAK No. 45
 - b. Sebagai sarana dalam mewujudkan tujuan Badan Layanan Umum yaitu
 - c. berorientasi pada hasil, profesionalitas serta akuntabilitas dan transparan.
2. Bagi Pemerintah:
 - a. Sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun peraturan-peraturan dalam mencapai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Badan Layanan Umum
3. Bagi Pembaca
 - a. Sebagai sumber informasi mengenai aktivitas internal dan eksternal yang dilakukan oleh rumah sakit.
 - b. Menambah pengetahuan mengenai akuntansi untuk organisasi nirlaba, khususnya rumah sakit

- c. Sebagai bahan referensi peneliti-peneliti lain yang juga bermaksud mengadakan penelitian yang sama.

4. Bagi Penulis

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang PSAK No. 45 dalam pelaporan keuangan organisasi nirlaba.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan secara singkat mengenai pendahuluan dari proposal yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini diuraikan beberapa pengertian mengenai teori-teori yang berhubungan dengan topik penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III : Metode Penelitian

Dalam bab ini diuraikan metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini.

BAB IV : Gambaran Singkat Perusahaan

Dalam bab ini diuraikan tentang sejarah singkat rumah sakit, tugas pokok dan fungsi, visi dan misi perusahaan serta struktur organisasi.

BAB V : Hasil penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini di uraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan

BAB VI : Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini di uraikan kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian dan saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Standar Akuntansi Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan (Agus, 2014 : 2).

Akuntansi keuangan adalah suatu proses yang berujung pada penyajian laporan keuangan suatu perusahaan yang digunakan oleh pihak internal maupun eksternal (Samryn, 2014 : 8). Akuntansi keuangan menghasilkan laporan keuangan yang menyajikan informasi yang bersifat umum sehingga tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan informasi setiap pemakai. Akuntansi keuangan ditinjau dari sudut pandang aktivitas akuntansi yakni sebagai berikut, “Akuntansi keuangan merupakan pencatatan peristiwa-peristiwa yang menyebabkan perubahan kekayaan, modal baik besarnya maupun susunannya. Aktivitas ini meliputi: (1) klasifikasi transaksi, (2) pencatatan dan pembuatan ikhtisar, dan (3) penyajian laporan tahunan berupa laporan laba rugi dan neraca.”

Akuntansi Keuangan di Indonesia disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yaitu IAI. Indonesia juga telah memiliki Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan yang merupakan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para pemakai eksternal. Jika terdapat pertentangan antara kerangka dasar dan Standar Akuntansi Keuangan maka ketentuan Standar Akuntansi

Keuangan yang harus diunggulkan relatif terhadap kerangka dasar ini. Karena kerangka dasar ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Komite Penyusun Standar Akuntansi Keuangan dalam mengembangkan Standar Akuntansi Keuangan di masa datang dan dalam peninjauan kembali terhadap Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, maka banyaknya kasus konflik tersebut akan berkurang dengan berjalannya waktu (IAI, 2009).

Secara garis besar ada empat hal pokok yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan yaitu:

1. Pengakuan unsur laporan keuangan
2. Definisi elemen dan pos laporan keuangan
3. Pengukuran unsur laporan keuangan
4. Pengungkapan atau penyajian informasi keuangan dalam laporan keuangan.

B. Organisasi Nirlaba

a. Pengertian Organisasi Nirlaba

Organisasi nirlaba atau organisasi non profit adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (Sujarweni, 2015 : 215). Menurut PSAK Nomor 45 bahwa organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari pemberi sumber daya sumbangan

yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat dengan jumlah sumber daya yang diberikan. (IAI, 2011: 45.1).

Organisasi nirlaba meliputi gereja,sekolah negeri, derma publik, rumah sakit dan klinik publik, organisasi politis, bantuan masyarakat dalam halperundang-undangan, organisasi jasa sukarelawan, serikat buruh, asosiasi profesional, institute riset, museum,dan beberapa para petugas pemerintah.

b. Karakteristik Organisasi Nirlaba

Di dalam PSAK No. 45 (Revisi 2011) (IAI, 2011: 45.2-45.3) terdapat penjelasan mengenai karakteristik organisasi nirlaba yaitu sebagai berikut:

1. Sumber daya entitas nirlaba berasal dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.
2. Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan menumpuk laba, dan jika entitas nirlaba menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut.
3. Tidak ada kepemilikan seperti umumnya pada entitas bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam entitas nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut

tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas nirlaba.

c. Standar Akuntansi Keuangan Organisasi Nirlaba

Di Indonesia, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 sebagai standar khusus pelaporan keuangan organisasi nirlaba. PSAK No. 45 yang digunakan saat ini, adalah PSAK No. 45 (Revisi 2011) tentang Pelaporan Keuangan organisasi Nirlaba yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 8 April 2011 menggantikan PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba yang telah dikeluarkan pada tanggal 23 Desember 1997.

Tujuan dibuatnya PSAK No. 45 adalah untuk mengatur pelaporan keuangan entitas nirlaba, sehingga dengan adanya pedoman pelaporan diharapkan laporan keuangan entitas nirlaba dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dan memiliki daya banding yang tinggi (IAI, 2011: 45.2).

Karakteristik organisasi nirlaba sangat berbedadengan organisasi bisnis yang berorientasi untuk memperoleh laba. Perbedaan terletak pada cara organisasi memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasionalnya. Organisasi memperoleh sumber dayadari sumbangan para anggota dan penyumbang lain yang tidakmengharapkan imbalan apapun dari organisasi yang

bersangkutan. Sebagai akibat dari karakteristik tersebut, dalam organisasi nirlaba timbul transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam organisasi bisnis, contohnya penerimaan sumbangan. Pada beberapa bentuk organisasi nirlaba meskipun tidak ada kepemilikan, organisasi tersebut mencukupi modalnya dari hutang dan mendanai kegiatan operasionalnya dari pendapatan atas jasa yang diberikan kepada publik. Akibatnya pengukuran jumlah, saat dan kepastian aliran pemasukan kas menjadi ukuran kinerja yang penting bagi para pengguna laporan keuangan organisasi tersebut, seperti kreditur dan pemasok dan lainnya. Berikut ini adalah pengertian-pengertian menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45:

a. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, kreditur dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba. Secara rinci, tujuan laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan, adalah untuk menyajikan informasi mengenai:

1. Jumlah dan sifat aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih suatu organisasi.
2. Pengaruh transaksi, peristiwa, dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat aktiva bersih.
3. Jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam suatu periode dan hubungan antara keduanya.

4. Cara suatu organisasi mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, dan faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditasnya.
5. Usaha jasa suatu organisasi.

b. Unsur-Unsur Laporan Keuangan Nirlaba

Laporan keuangan organisasi nirlaba menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 meliputi:

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan

Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban dan aktiva bersih, serta mengetahui hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Laporan posisi keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan, menyediakan informasi yang relevan mengenai likuiditas, fleksibilitas keuangan, dan hubungan antara aktiva dan kewajiban. Informasi tersebut umumnya disajikan dalam pengumpulan aktiva dan kewajiban yang memiliki aktivitas serupa dalam suatu kelompok yang relatif homogen.

a. Klasifikasi Aktiva Bersih atau Tidak Terikat:

Laporan posisi keuangan menyajikan jumlah masing-masing kelompok aktiva bersih berdasarkan ada tidaknya pembatasan oleh penyumbang, yaitu terikat secara permanen, terikat secara temporer, dan tidak terikat. Pengertian istilah yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Pembatasan permanen adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen, tetapi organisasi diizinkan untuk menggunakan semuanya atau sebagian atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut.
 - 2) Pembatasan temporer adalah pembatasan penggunaan sumber daya oleh penyumbang yang menetapkan, agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu.
 - 3) Sumbangan terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Pembatasan tersebut dapat bersifat permanen atau temporer.
 - 4) Sumbangan tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang.
- b. Aktiva bersih tidak terikat umumnya meliputi pendapatan jasa, dikurangi beban untuk memperoleh pendapatan tersebut. Batasan terhadap penggunaan aktiva bersih tidak terikat dapat berasal dari sifat organisasi, lingkungan operasional, dan tujuan organisasi yang tercantum dalam akta pendirian dan dari perjanjian kontrak dengan organisasi lain. Informasi mengenai

batasan-batasan tersebut umumnya disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

2. Laporan aktivitas

Laporan aktivitas menyajikan jumlah perubahan aktiva bersih terikat permanen, terikat temporer dan tidak terikat dalam suatu periode. Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih, hubungan antar transaksi dan peristiwa lain, dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa.

a. Klasifikasi Pendapatan, Beban, Keuntungan, dan Kerugian:

Laporan aktivitas menyajikan pendapatan sebagai penambah aktiva bersih tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi oleh penyumbang dan menyajikan beban sebagai pengurang aktiva bersih tidak terikat. Sumbangan disajikan sebagai penambah aktiva bersih tidak terikat, tidak permanen, atau terikat temporer, tergantung pada ada tidaknya pembatasannya. Dalam hal sumbangan terikat yang pembatasannya tidak berlaku lagi dalam periode yang sama, dapat disajikan sebagai sumbangan tidak terikat sebatas disajikan secara konsisten dan diungkapkan sebagai kebijakan akuntansi.

Laporan aktivitas menyajikan keuntungan dan kerugian yang diakui dari investasi dan aktiva lain atau kewajiban sebagai

penambah atau pengurang aktiva bersih tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi.

b. Informasi Pemberian Jasa:

Laporan aktivitas atau catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi mengenai beban menurut klasifikasi fungsional, seperti menurut kelompok program jasa utama dan aktivitas pendukung. Klasifikasi fungsional bermanfaat untuk membantu para penyumbang, kreditur dan pihak lain dalam menilai pemberian jasa dan penggunaan sumber daya. Di samping penyajian klasifikasi penyajian beban secara fungsional, organisasi nirlaba dianjurkan untuk menyajikan informasi tambahan mengenai beban menurut sifatnya. Program pemberian jasa merupakan aktivitas untuk menyediakan barang dan jasa kepada penerima manfaat, pelanggan atau anggota dalam rangka mencapai tujuan dan hasil utama yang dilaksanakan melalui berbagai program utama.

Aktivitas pendukung meliputi semua aktivitas selain program pemberian jasa. Umumnya aktivitas pendukung meliputi manajemen dan umum, pencarian dana, dan pengembangan anggota. Aktivitas manajemen dan umum meliputi pengawasan, manajemen bisnis, pembukuan, penganggaran, pendanaan, dan aktivitas administratif lainnya, dan semua

aktivitas manajemen dan administrasi, kecuali program pemberian jasa atau pencarian dana, pengadaan daftar alamat penyumbang, pelaksanaan acara khusus pencarian dana, pembuatan penyebaran manual, petunjuk dan bahan lainnya, dan pelaksanaan aktivitas lain dalam rangka pencarian dana dari individu, yayasan, pemerintah, dan lain-lain. Aktivitas pengembangan anggota meliputi pencarian anggotan baru, pengumpulan iuran anggota, hubungan dan aktivitas sejenis.

3. Laporan arus kas untuk satu periode laporan

Tujuan umum laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Laporan ini digunakan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menggunakan arus tersebut. Penilaian atas kemampuan menghasilkan kas dikaitkan dengan aktivitas yang dijalankan perusahaan, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

a) Aktivitas operasi

Mencakup penjualan dan pembelian atau produksi barang dan jasa, termasuk penagihan pelanggan, pembayaran kepada pemasok atau karyawan dan pembayaran item-item seperti sewa, pajak, dan bunga.

b) Aktivitas investasi

Mencakup perolehan dan penjualan aktiva jangka panjang untuk berbagai investasi jangka panjang.

c) Aktivitas pendanaan

Mencakup pengadaan sumber daya dari pemilik serta kreditur dan pengembalian jumlah yang dipinjam.

4. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan, merupakan bagian yang tidak terpisah dari laporan-laporan di atas. Tujuan pemberian catatan ini agar seluruh informasi keuangan yang dianggap perlu untuk diketahui pembacanya sudah diungkapkan.

c. Basis Akuntansi

1) Akuntansi berdasarkan kas (*cash basis*)

Pendapatan dicatat hanya bila kas diterima dan beban dicatat hanya bila kas keluar.

2) Akuntansi berdasar akrual (*accrual basis*)

Mengakui dampak transaksi terhadap laporan keuangan dalam periode waktu ketika pendapatan dan beban terjadi. Oleh karena itu pendapatan dicatat pada waktu diterima dan beban dicatat pada waktu terjadi, tidak perlu ketika kas berpindah tangan

3) Akuntansi berdasarkan kas yang dimodifikasi

Merupakan campuran atas dasar kas dan akrual, yaitu metode yang digunakan oleh perusahaan jasa. Pengeluaran yang mempunyai

umur ekonomis lebih dari satu tahun dikapitalisasi sebagai harta dan disusutkan selama tahun-tahun mendatang. Beban dibayar di muka dan ditangguhkan, dan dikurangi hanya dalam tahun saat hal itu digunakan, sedangkan beban yang dibayar sesudah tahun terjadinya (beban yang masih harus dibayar) dikurangi hanya dalam tahun dibayarkan.

C. Badan Layanan Umum

a. Pengertian Badan Layanan Umum

Sesuai dengan pasal 1 butir 23. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan:

“Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas”.

Secara spesifik karakteristik organisasi yang merupakan Badan Layanan Umum, yaitu:

1. Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah yang tidak dipisahkan dari kekayaan Negara.
2. Menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan masyarakat.
3. Tidak mengutamakan pencarian laba.

4. Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala korporasi.
5. Rencana kerja, anggaran dan pertanggungjawabannya dikonsolidasikan pada instansi induk.
6. Penerimaan baik pendapatan maupun sumbangan dapat digunakan secara langsung.
7. Pegawai dapat terdiri dari pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil.
8. BLU bukan subyek pajak.

Sehubungan dengan karakteristik yang spesifik tersebut. BLU dihadapkan pada peraturan yang spesifik pula, berbeda dengan organisasi yang merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan (BUMN/ BUMD). Perbedaan tersebut terletak pada hal-hal sebagai berikut:

1. BLU dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Kekayaan BLU merupakan bagian dari kekayaan negara/ daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLU yang bersangkutan.
3. Pembinaan BLU instansi pemerintah pusat dilakukan oleh Menteri Keuangan dan pembinaan teknis dilakukan oleh Menteri yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan.

4. Pembinaan keuangan BLU instansi pemerintah daerah dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah dan pembinaan teknis dilakukan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan.
5. Setiap BLU wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan.
6. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta laporan keuangan dan laporan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RKA serta laporan keuangan dan laporan kinerja kementerian negara/lembaga/ pemerintah daerah.
7. Pendapatan yang diperoleh BLU sehubungan dengan jasa layanan yang diberikan merupakan pendapatan negara/ daerah.
8. Pendapatan tersebut dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja yang bersangkutan.
9. BLU dapat menerima hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain.
10. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan BLU diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 tahun 2005.

Dengan pemikiran baru tersebut diharapkan bukan bentuknya saja suatu unit pemerintah menjadi Badan Layanan Umum yang melayani masyarakat tetapi tingkat pelayanan masyarakat dapat ditingkatkan dengan cara yang profesional, efektif dan efisien oleh pengelola unit tersebut dengan otonomi pengelolaan yang akan diberikan.

Apabila dikelompokkan menurut jenisnya Badan Layanan Umum terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu:

1. BLU yang kegiatannya menyediakan barang atau jasa meliputi rumah sakit, lembaga pendidikan, pelayanan lisensi, penyiaran, dan lain-lain.
2. BLU yang kegiatannya mengelola wilayah atau kawasan meliputi otorita pengembangan wilayah dan kawasan ekonomi terpadu (Kapet).
3. BLU yang kegiatannya mengelola dana khusus meliputi pengelola dana bergulir, dana Usaha Kecil dan Menengah (UKM), penerusan pinjaman dan tabungan pegawai.

b. Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum

Dalam pelaksanaan pengembangan dan penerapan sistem akuntansi Badan Layanan Umum yang mengacu pada standar akuntansi yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu diatur ketentuan mengenai pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan Badan Layanan Umum. Berdasar pertimbangan hal inilah Menteri Keuangan Republik Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMP.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.

c. Landasan Hukum Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Dalam rangka penyelenggaraan fungsi organisasi Badan Layanan Umum berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik untuk memberikan layanan yang bermutu dan berkesinambungan, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Badan Layanan Umum yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 4400),
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502),
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503),

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614),
7. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005,
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat,
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Dengan disahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU), maka status rumah sakit pemerintah kini berubah menjadi Badan Layanan Umum.

d. Rumah Sakit Pemerintah Berstatus Badan Layanan Umum

Istilah Badan Layanan Umum muncul setelah ditetapkannya Undang-Undang no 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara yang ditetapkan sesuai dengan semangat reformasi dan otonomi daerah. Misi reformasi keuangan ditujukan pada akuntabilitas dan transparansi keuangan yang profesional. Dengan penetapan rumah sakit pemerintah menjadi Badan Layanan Umum diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.

Sebagai tahap awal, pemerintah menetapkan 13 rumah sakit yang statusnya perusahaan jawatan (Perjan) menjadi BLU. Yaitu enam rumah sakit di Jakarta (RSCM, RS Persahabatan, RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, RS Kanker Dharmais), dan masing-masing satu rumah sakit di Bandung (RS Dr Hasan Sadikin), di Semarang (RS Dr Kariadi), di Yogyakarta (RS Dr Sarjito), di Denpasar (RS Sanglah), di Makassar (RS Dr Wahidin Sudirohusodo) di Padang (RS Dr M Djamil), dan RS Dr Mohammad Hoesin di Palembang. saat ini sebagian besar rumah sakit pemerintah pengelolaannya sudah dalam bentuk BLU. Sesuai dengan SK Walikota Makassar No. 445/0174/2007 tanggal 18 Juni 2007 yang menyatakan RSUD Prof. Dr. A Makkatutu Kota Bantaeng sekarang telah menjadi Badan Layanan Umum.

D. Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian pada subjek organisasi nirlaba. Berikut ini adalah mapping penelitian terdahulu :

Tabel 2.1 Mapping Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Fitri Purnamasari (2014)	Analisis penerapan PSAK No. 45 pada yayasan di Kota Malang	Deskriptif kualitatif	Penerapan PSAK Nomor 45 khususnya di Kota Malang telah dilakukan oleh beberapa yayasan tertentu, dan mayoritas yayasan yang menerapkan termasuk dalam yayasan besar yang sudah memiliki nama dimata publik, namun demikian tolak ukur tersebut tidak sepenuhnya dapat dijadikan dasar penilaian adanya sistem keuangan di dalam yayasan yang baik dan terstandar. Beberapa faktor yang mendukung diterapkannya PSAK, diantaranya faktor kebutuhan akan sistem yang baik dan diakui, serta faktor keinginan yayasan untuk memiliki sistem yang terbuka pada publik. Dan beberapa faktor yang menghambat diterapkannya PSAK diantaranya yayasan belum merasa memerlukan adanya sistem sesuai PSAK serta adanya kesulitan akan pengadaptasian sistem PSAK tersebut.

2.	Husnia Novia Yuhaida (2015)	Penerapan laporan keuangan Organisasi Nirlaba berdasarkan PSAK nomor 45 (Studi Kasus pada Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Assalbiyah)	Kualitatif. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan tahapan analisis data Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kemudian penarikan kesimpulan.	Laporan yang dibuat oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Assalbiyah belum sesuai dengan PSAK 45. Peneliti membuat laporan konsolidasi unit sekolah Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Assalbiyah dan kemudian menerapkan PSAK 45 dalam laporan keuangan lembaga pada tahun 2013 yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
3.	Resha Dwi Ayu (2014)	Rekonstruksi pelaporan keuangan organisasi nirlaba pada Yayasan Pendidikan Islam Indocakti Malang berdasarkan PSAK nomor 45	Kualitatif deskriptif	Laporan keuangan yang diterapkan oleh Yayasan Pendidikan Islam belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 dan klasifikasi mengenai pendapatan, beban dan aktiva bersih tidak disajikan dalam laporan keuangan.

Tabel 2.2. Mapping Jurnal Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Siti Nurlaela dan Mutmainah (2014)	Implementasi PSAK No. 45 dalam Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba Berstatus Badan Layanan Umum	Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kualitatif yang lebih menekankan pada teknik wawancara. Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian adalah penulisan yang bersifat deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran yang mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat, serta karakteristik-karakteristik yang khas dari subyek yang diteliti	BBKPM Surakarta telah menyajikan laporan keuangan sesuai PSAK No. 45 dan ketentuan yang berlaku bagi Badan Layanan umum yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum dan PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba dapat diterapkan penuh pada Badan Layanan Umum khususnya BBKPM Surakarta.
2	Ridwan Ibrahim dan Tri Handayani (2009)	Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 Pada Baitul Mal Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	Data penelitian diklasifikasikan dalam bentuk data sekunder. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis data yaitu dengan cara membandingkan hasil penelitian dengan teori yang telah dikemukakan dalam tinjauan kepustakaan.	Laporan keuangan pada Baitul Mal telah menerapkan PSAK Nomor 45 yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Namun, penyajian penyusunan dari masing-masing laporan keuangan pada Baitul Mal tersebut belum sepenuhnya mengikuti PSAK Nomor 45, ada hal yang material yang belum disajikan pada masing-masing laporan tersebut .
3	Diyani Ade Rizky dan Yazid Yud Padmono	Analisis Penerapan PSAK No. 45 Pada Yayasan Masjid Al Falah Surabaya	Teknik pengumpulan data utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan observasi dan	Yayasan telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam PSAK No. 45 dimana yayasan menyusun empat

	(2013)		wawancara. Teknik analisis data yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode studi kasus.	laporan keuangan.namun terdapat beberapa perbedaan yaitu, yayasan tidak mencatatkan penerimaan hibah atau wakaf yang telah diterima.
4	Ignasius Rian Gultom dan Agus T. Poputra (2015)	Analisis Penerapan PSAK No. 45 Tentang Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Dalam Mencapai Transparansi dan Akuntabilitas Kantor Sinode GMIM	jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif berupa hasil wawancara dan kuantitatif berupa laporan keuangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan Studi Pustaka	Kantor Sinode GMIM belum menerapkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan format laporan keuangan nirlaba yang terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.45, karena kantor sinode GMIM selama ini hanya menyusun Laporan Realisasi Anggaran Belanja dan Pendapatan sesuai arahan yang terdapat dalam tata Gereja Masehi Injili di Minahasa.
5	Angelia Novrina Meilani Tinungki dan Rudy J. Pusung (2014)	Penerapan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Berdasarkan PSAK No. 45 pada Panti Sosial Tresna Werdha Hana	Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan teknik analisis kualitatif yang sifatnya menguraikan, menggambarkan serta membandingkan suatu data.	Panti Sosial Tresna Werdha HANA sudah menyajikan laporan keuangannya namun belum menerapkan penyusunan laporan keuangan organisasi nirlaba sesuai dengan format PSAK No.45. Panti Sosial Tresna Werdha HANA hanya menyajikan format laporan keuangan sesuai dengan pemahaman mereka.
6	Claudia W.M. Korompis (2014)	Penerapan PSAK No. 45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba Pada Sanggar Seni Budaya Logos	Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif sifatnya menguraikan, menggambarkan,	Laporan keuangan Sanggar Seni Budaya Logos Makantar belum menyusun laporan keuangan sesuai dengan format laporan keuangan nirlaba yang ada dalam Pernyataan

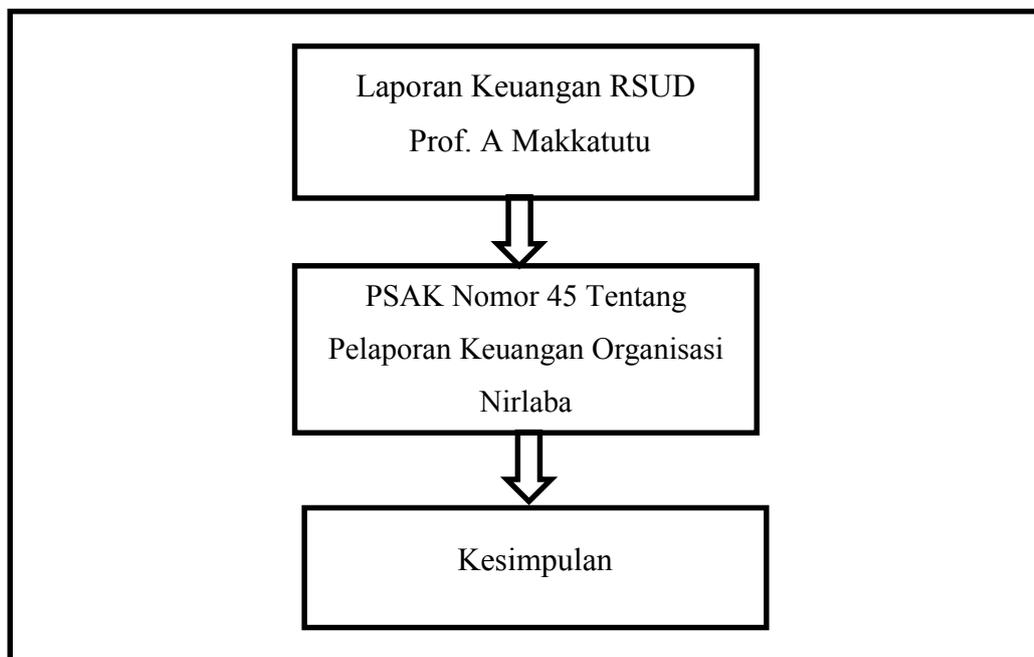
		Ma'kantar	membandingkan suatu data	Standar Akuntansi No. 45, dan hal ini membuat pengurus terpacu untuk segera menerapkan laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 45 untuk kepentingan organisasi kedepan.
7	Wahyu Repi, Grace B. Mogi-Nangoi, dan HeinceWokas (2015)	Analisis Penerapan PSAK No. 45 (revisi 2011) Tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba Pada Stikes Muhammadiyah Manado.	Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif sifatnya memberikan gambaran yang mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakteristik yang khas dari subjek penelitian.	STIKES Muhammadiyah Manado belum menerapkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan format laporan keuangan nirlaba yang terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.45, karena untuk penyusunannya STIKES Muhammadiyah hanya mengacu sesuai arahan dan kebutuhan dari yayasan yang bentuknya masih berupa neraca saldo.Walaupun tidak mengikuti format laporan keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, namun secara umum tujuan penyusunan laporan keuangan pada STIKES Muhammadiyah telah tercapai, walaupun masih ada informasi-infomasi tertentu belum jelas.
8	Ronny	Analisis Penerapan	Metode penelitian yang	RSUD Kota Semarang telah menyajikan

	Hendrawan dan Dr. Endang kiswara, M.Si, akt	PSAK No. 45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba Pada Rumah Sakit Berstatus Badan Layanan Umum	digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif.	laporan keuangan sesuai PSAK No. 45 dan ketentuan yang berlaku bagi Badan Layanan umum dan dapat diterapkan penuh pada Badan Layanan Umum khususnya rumah sakit.
9	M. Miftakul Amin (2015)	Rancang Bangun Sistem informasi Akuntansi Menggunakan Standar PSAK No. 45 Bagi Organisasi Nirlaba	Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah metode waterfall sebagai tahapan pengembangan yang terdiri dari tahapan planning, analisis, desain, coding dan testing.	Aplikasi yang telah mampu menghasilkan beberapa proses transaksi keuangan sesuai dengan standar PSAK No. 45 dengan siklus akuntansi dan laporan keuangan seperti laporan arus kas, laporan aktifitas dan laporan posisi keuangan.
10.	Erawati Nur Diana (2015)	Rekonstruksi Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba Pada Yayasan Ibnu Katsir Jember Berdasarkan PSAK Nomor 45.	Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari narasumber melalui wawancara dan data skunder yang diperoleh secara tidak langsung berupa laporan keuangan yayasan. Metode analisis data dilakukan dengan melalui tahapan menganalisis hasil wawancara dan kerangka laporan keuangan.	Laporan keuangan yang diterapkan oleh Yayasan Ibnu Katsir Jember belum sesuai dengan PSAK No. 45 dimana terdapat akun-akun yang ditempatkan ditempat yang kurang tepat, pengurutan beban yang tidak disesuaikan dengan tujuan utama yayasan, tidak mengurutkan liabilitas sesuai dengan kelompoknya, dan memberikan rincian secara langsung sehingga tidak rapi, tidak memberikan penandaan sebagai rujukan rincian yang dijabarkan dalam CALK, sertatidak menyertakan laporan penyusutan dalam laporan keuangannya.

E. Kerangka Pemikiran

Laporan keuangan adalah alat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pengelola untuk disampaikan kepada yang berhak menerima pertanggungjawaban. Penelitian ini menganalisis penyajian laporan keuangan yang dilakukan RSUD Prof. Dr. A Makkatutu Kabupaten Bantaeng dengan mengacu pada ketentuan PSAK No.45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba.. Keseluruhan komponen laporan keuangan rumah sakit tersebut akan menjadi variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini dan akan dilakukan perbandingan apakah format laporan keuangan telah sesuai dengan PSAK Nomor 45 sehingga dapat diambil suatu kesimpulan.

Kerangka pemikiran sebagaimana diuraikan diatas dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Bagan Kerangka Pikir Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam rangka pengumpulan data dan informasi yang relevan dengan judul proposal penelitian ini, maka objek penelitian ini dilakukan pada RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu yang bertempat di Jalan Teratai no. 20 Kabupaten Bantaeng, dalam jangka waktu 1 bulan (01 April-30 April).

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data ini terdiri dari:

- a. Data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari instansi dalam bentuk informasi, baik secara lisan maupun secara tertulis.
- b. Data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari instansi dalam bentuk angka-angka.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber data, yaitu:

- a. Data Primer

Berupa data subjek yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang berupa data mengenai struktur organisasi, aktivitas operasional yang terjadi dan gambaran umum organisasi.

b. Data Sekunder

Berupa data internal yang diperoleh dari objek yang diteliti yaitu berupa laporan keuangan RSUD Prof. Dr. A Makkatutu Kabupaten Bantaeng.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian merupakan wilayah yang ingin diteliti oleh peneliti. Seperti menurut Sugiono (2011:80) “Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek atau objek yang memiliki karakter & kualitas tertentu yang ditetapkan oleh seorang peneliti untuk dipelajari yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan.” Pendapat di atas menjadi salah satu acuan bagi penulis untuk menentukan populasi. Populasi yang akan digunakan sebagai penelitian yaitu RSUD Prof. A Makkatutu.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti oleh peneliti. Menurut Sugiyono (2011:81) “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.” Sehingga sampel merupakan bagian dari populasi yang ada, sehingga untuk pengambilan sampel harus menggunakan cara tertentu yang didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang ada. Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan bulanan RSUD Prof. A Makkatutu tahun 2016.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Wawancara

Metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan kepada responden. wawancara ini bersifat tidak terstruktur dan dilakukan kepada pihak manajemen RSUD Prof. A Makkatutu, khususnya dengan bagian Pengembangan dan Informasi, dan Bagian Keuangan. Metode ini digunakan dalam rangka mendapatkan data primer berupa struktur organisasi, aktivitas operasional yang sering terjadi gambaran umum dan kondisi keuangan RSUD Prof. Dr. A Makkatutu Kab. Bantaeng pada umumnya.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka sebagai bagian dari langkah studi eksploratif yang digunakan yang merupakan suatu metode pengumpulan data dengan mencari informasi-informasi yang dibutuhkan melalui dokumen-dokumen, buku-buku, majalah atau sumber data tertulis lainnya baik yang berupa teori, laporan penelitian atau penemuan sebelumnya (*findings*) yang berhubungan dengan proses akuntansi Badan Layanan Umum. Metode ini digunakan untuk memperoleh data berupa sejarah perusahaan, bidang usaha perusahaan, termasuk juga laporan kinerja RSUD Prof. Dr. A Makkatutu Kabupaten Bantaeng.

E. Definisi Operasional Variabel

Variabel adalah konsep yang mempunyai variasi nilai. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel :

1. Variabel Terikat : PSAK Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba.
2. Variabel Bebas : Laporan Keuangan RSUD Prof. A Makkatutu

Definisi operasional variabel adalah suatu pernyataan yang dapat mengartikan atau memberikan makna untuk suatu istilah atau konsep tertentu, sehingga tidak salah dimengerti, dapat diuji dan ditentukan atau dinyatakan kebenarannya oleh orang lain. Dalam penelitian ini variabel-variabel yang diteliti antara lain, berdefinisi:

1. PSAK Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba
PSAK 45 (revisi 2011) tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi keuangan pada tanggal 8 April 2011, menggantikan PSAK 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba yang telah dikeluarkan pada tanggal 23 Desember 1997. Organisasi Nirlaba menyediakan jasa dan tidak beritikad untuk memperoleh laba, organisasi ini umumnya dibiayai dari kontribusi, perolehan dana dari endowment atau investasi, pengenaan tarif atas jasa yang diberikan dan pemberian bantuan dari pemerintah. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangannya suatu organisasi nirlaba dapat memperoleh suatu surplus yang merupakan selisih antara aliran kas

masuk dengan aliran kas keluar. Dalam PSAK Nomor 45 menguraikan tentang tujuan laporan keuangan, sifat pembatasan dana, dan komponen laporan keuangan

2. Laporan Keuangan RSUD Prof. A Makkatutu

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan/organisasi. Laporan keuangan organisasi Nirlaba menurut PSAK nomor 45 meliputi:

- a. Laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan
- b. Laporan aktivitas
- c. Laporan arus kas untuk satu periode laporan
- d. Catatan atas laporan keuangan

F. Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penulisan yang bersifat deskriptif dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakteristik-karakteristik yang khas dari subjek yang diteliti dan membandingkan antara teori dan praktek dalam penyusunan laporan keuangan rumah sakit. Pada metode ini dilakukan perbandingan apakah format laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan PSAK 45 atau masih perlu dilakukan penyesuaian. Apabila penyajian laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam PSAK No. 45 maka penyajian akun tersebut dikatakan benar. Apabila penyajian laporan

keuangan belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam PSAK No. 45 maka penyajian akun tersebut dikatakan salah dan perlu dilakukan penyesuaian.

Studi eksploratif yang bersifat teoritis juga dilaksanakan berdasarkan suatu pertimbangan untuk mendapatkan perbandingan yang lebih baik pada masalah yang bersangkutan (pelaporan keuangan Rumah Sakit Badan Layanan Umum), karena terbatasnya studi atau penelitian (termasuk literatur-literatur) yang membahas mengenai pelaporan keuangan BLU.

Penelitian yang mengevaluasi laporan keuangan tahunan RSUD Prof. A Makkatutu sebagai Badan Layanan Umum diawali dengan analisis komparatif terhadap objek penelitian dengan konsep pembanding dalam hal kebijakan akuntansi maupun penyajian laporan keuangan, kemudian mencoba menyesuaikan dan mengkombinasikan empat unsur, yaitu:

1. PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1164/MENKES/SK/X/2007 tentang Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Badan Layanan Umum.
4. Laporan Keuangan RSUD Prof. Dr. A Makkatutu Kabupaten Bantaeng.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Gambaran Singkat Rumah Sakit

Rumah Sakit adalah suatu institusi yang merupakan suatu industri jasa pelayanan yang mempunyai potensi besar untuk terus dikembangkan pada masa – masa yang akan datang, ini tentunya dengan tidak menanggalkan fungsi sosial yang juga diembannya. Menghadapi era yang terus berubah Rumah Sakit semakin dituntut untuk memberikan pelayanan jasa yang bermutu dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu Bantaeng didirikan pada tahun 1921 dan merupakan warisan Pemerintah Belanda, sehingga sebagian bangunannya terutama pada ruang perawatan masih merupakan bangunan yang berada di jantung kota Bantaeng terletak di sebelah selatan Propinsi Sulawesi Selatan dengan posisi 5 derajat 21'113" – 5 derajat 31'26" Lintang Selatan dan 119 derajat 51'42"– 120 derajat 05'27" Bujur Timur dengan batas wilayah :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Gowa
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Bulukumba
- c. Sebelah Selatan : Laut Flores
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Jeneponto

Sedangkan nama Rumah Sakit di ambil dari nama salah satu putra daerah Kabupaten Bantaeng yang merupakan Guru Besar Pada Bagian Ilmu Kulit dan Kelamin Fakultas kedokteran Universitas Hasanuddin.

Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng sebagai rumah sakit milik pemerintah daerah dan merupakan satu-satunya pusat rujukan di Kab. Bantaeng dalam pemberian pelayanannya senantiasa berupaya untuk memberikan yang terbaik untuk pelanggannya yang bukan hanya melayani masyarakat Kabupaten Bantaeng saja akan tetapi juga melayani masyarakat tetangga seperti Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Bulukumba.

Sebagai pemberi pelayanan kesehatan yang terbesar di Tingkat Kabupaten maka RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu Bantaeng selain memberikan pelayanan dasar yang bersifat pokok seperti Rawat Jalan, Rawat Inap, Gawat Darurat, Kebidanan/kandungan dan imunisasi juga memberikan pelayanan penunjang seperti Radiologi, Ultrasonografi, Rehabilitasi Medis, Laboratorium, Unit Pelayanan Transfusi Darah, serta Pelayanan Rujukan. Berdasarkan surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1284/MENKES/SK/XII/2004 tanggal 17 Desember 2004 tentang Peningkatan Kelas RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu Bantaeng dari Tipe D menjadi Rumah Sakit Tipe C.

Adanya perubahan tuntutan masyarakat terhadap fungsi pelayanan umum yang diselenggarakan oleh sektor publik telah mendorong setiap instansi pemerintah untuk meresponnya dalam rangka memberikan pelayanan prima (Service Excellence). Layanan prima adalah proses penanganan penyediaan barang atau jasa publik dengan standar mutu yang dapat di pertanggung jawabkan. Salah satu wujud kepedulian Rumah Sakit terhadap

mutu pelayanan yang di berikan kepada masyarakat terbukti dengan adanya Pengakuan berupa sertifikasi Akreditasi oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan Nomor sertifikat : YM.01.10/III/3136/09 yang berlaku sejak 13 Agustus 2009 sampai dengan 13 Agustus 2012. Kemudian, wujud kepedulian Rumah Sakit terhadap mutu pelayanan yang diberikan dengan dibuktikan dengan terpilihnya Rumah Sakit sebagai Juara I Lomba Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi Tingkat Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 3776/XI/TAHUN 2009 Tanggal 23 Maret 2009. Dan mendapat penghargaan Pelayanan Prima seSulawesi Selatan tahun 2013.

RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makatutu Kabupaten Bantaeng di tetapkan untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (PPK-BLUD) berdasarkan SK Bupati Bantaeng Nomor 061/372/X/2015 tentang penetapan RSUD Bantaeng sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantaeng yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh.

B. Tugas Pokok Dan Fungsi

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng maka tugas pokok RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng adalah :

“Melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan”.

Sedangkan fungsi RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu Bantaeng adalah

- a. Penyelenggaraan pelayanan medik
- b. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik
- c. Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan
- d. Penyelenggaraan pelayanan rujukan
- e. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- f. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan
- g. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan

C. Visi dan Misi Rumah Sakit

a. Visi Rumah Sakit

Rumah Sakit sebagai sebuah institusi yang menyelenggarakan pelayanan jasa sebagai produk utamanya. Dalam penyelenggaraan pelayanan tersebut, maka kualitas, keamanan dan kenyamanan menjadi inti dari hasil produknya. Disisi lain, rumah sakit menghadapi tuntutan masyarakat yang semakin kompleks dan kritis serta adanya persaingan global. Sehingga rumah sakit memerlukan semangat atau spirit serta harapan yang diinginkan dalam menjaga eksistensi dan perkembangannya. Untuk itu RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu menetapkan Visinya sebagai berikut :

“Terwujudnya pelayanan Rumah Sakit yang bermutu dan sejahtera menuju pelayanan prima tahun 2018”.

Sebagai pemahaman bahwa Pelayanan prima dimaknai pada fokus peningkatan pelayanan dengan nilai-nilai moral berdasarkan etika profesi dan standar pelayanan dengan efektif, dan efisien, serta mengacu pada System Kesehatan Nasional dimana RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu dalam menghadapi persaingan yang semakin kompetitif harus mempunyai nilai tambah dimata konsumennya berupa kualitas produk yang bisa memenuhi dan memuaskan harapan konsumen, sehingga masyarakat Sulawesi Selatan memposisikan RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu sebagai suatu alternatif utama untuk menyelesaikan masalah kesehatannya.

b. Misi Rumah Sakit

Untuk mencapai Visi Rumah Sakit maka di perlukan Misi yang harus di laksanakan adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan kepuasan Karyawan.
2. Memberikan pelayanan yang berkualitas dan menjadi pilihan terpercaya.
3. Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia.

D. Keadaan Pegawai, Sarana/Prasarana Dan Pembiayaan

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah tenaga keseluruhan yang ada di RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu Bantaeng pada tahun 2016 sebanyak 471 orang (PNS, Tenaga Kontrak, Tenaga Magang) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.3
DAFTAR PEGAWAI RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu
BERDASARKAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN
PER 31 DESEMBER TAHUN 2016

NO.	Kualifikasi Pendidikan	PNS	KONTRAK	MAGANG	TOTAL
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	S2 Kesehatan Masyarakat	5		-	5
2	S2 Manajemen Keuangan	-	1	-	1
3	S2 Manajemen SDM	2	-	-	2
4	Profesi Dokter Spesialis	18	3	-	21
5	Profesi Dokter Umum	10		1	11
6	Profesi Dokter Gigi	2	-	-	2
7	Profesi Ners	36	20	17	73
8	Profesi Apoteker	7		1	8
9	S1 Keperawatan	8	5	1	14
10	S1 Kesehatan Masyarakat	20	4	14	38
11	S1 Kesehatan lingkungan	2	1	2	5
12	S1 Gizi	1		2	3
13	S1 Farmasi	7	4	-	11
14	S1 Kimia Farmasi	1	-	-	1
15	S1 Fisioterapi	1	-	-	1
16	S1 Sosial	1	2		3
17	S1 Ekonomi	2	1	3	6
18	S1 Gizi	1	-	2	3
19	S1 Tehnik Lab.Kes	1	-	-	1
19	S1 Fisika Medik	1	-	-	1
20	S1 Manajemen Informatika	1	-	-	1
21	D4 Fisioterapi	3	-	-	3
22	D4 Analisis Kesehatan	2	-	-	2
23	D4 Kebidanan	7	1	-	8
24	D4 Farmasi	1	-	-	1
25	D4 Perawat Gigi	2	-	-	2
26	D3 Keperawatan	10	33	41	84
27	D3 Perawat Anastesi	1	-	-	1
28	D3 Perawat Gigi	2	-	-	2
29	D3 Kebidanan	13	10	18	41
30	D3 Farmasi	-	-	2	2
31	D3 Kimia	1	-	-	1

32	D3 Analisis Kesehatan	10	5	5	20
33	D3 Fisioterapi	1	-	1	2
34	D3 Radiologi	8	-	3	11
35	D3 Gizi	1	-	4	5
36	D3 Perkam Medik	4	-	-	4
37	D3 Kesehatan Lingkungan	3	2	-	5
38	D3 Elektromedik	3	-	-	3
39	D3 Akuntansi	2	-	-	2
40	D3 Agribisnis English	-	1	-	1
41	D1 Kebidanan	2			2
42	SMK Keperawatan		1	-	1
43	SMEA	1	-	-	1
44	SMU	6	7	-	13
45	STM	1	-	4	5
46	SMP	-	6	-	6
47	SD	-	32	-	32
	TOTAL	211	139	121	471

Sedangkan ketenagaan dilihat dari keteknisan pekerjaan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.4
Teknis Pekerjaan

NO	JENIS TENAGA	JUMLAH	KET
1	Dokter Ahli/spesialis	21	
	a. Penyakit Dalam	1	Tenaga tetap
	b. Obgyn	2	Tenaga tetap
	c. Bedah	3	Tenaga tetap
	d. Anak	1	Tenaga tetap
	e. Kedokteran Jiwa	2	Tenaga tetap
	f. THT	2	Tenaga tetap
	g. Gizi	1	Tenaga tetap
	h. Neurologi	1	Tenaga tetap
	i. Radiologi	1	Tenaga tetap
	j. Jantung	1	Tenaga tetap
	k. Anastesi	3	Tenaga tetap
	l. Mata	1	Tenaga tetap
	m. Kulit & Kelamin	1	Tenaga tetap
	n. Patologi Klinik	1	Tenaga tetap
2	Dokter Umum	18	
3	Dokter Gigi	2	
4	Tenaga Struktural	7	
5	Tenaga Keperawatan	179	
6	Tenaga Kebidanan	43	
7	Tenaga Kefarmasian	21	
8	Tenaga Gizi	14	
9	Tenaga keteknisan Medis	48	1. Laboratorium (25) 2. Fisioterapis (7) 3. Radiografer (11) 4. Elektromedis (4)

10	Tenaga Perekam Medik	4	
11	Tenaga Kesehatan Masyarakat	29	1. Adminkes (20) 2. Promkes (4) 3. Sanitarian (5) 4. Epidemiologi (4) 5. Kesker (1)
12	Tenaga Administrasi	28	
13	Tenaga kesling/sanitarian	5	
14	Cleaning Service	31	
15	Satpam	16	
16	Petugas gizi	5	
	TOTAL	471	

2. Sarana dan Prasarana

1. Bangunan

Bangunan RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu Bantaeng untuk tahun 2016 di atas tanah seluas 2.724,54 M2 dengan luas tanah perkantoran 2.948 M2 yang terletak di jalan Teratai no. 20 di Kelurahan Pallantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng.

Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat maka RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu Bantaeng akan melaksanakan pengembangan rumah sakit menjadi rumah sakit modern. Pembuatan Master Plan, DED dan Amdal di laksanakan pada Tahun 2011. Pembangunan di rencanakan dengan desain 8 lantai dengan luas + 12.000 M2, luas lantai untuk bangunan utama + 17.085 M2, bangunan utility + 3.082,2 M2.

Dengan jumlah 8 lantai bangunan utama dan 1 lantai bangunan utility, dengan uraian per lantai sebagai berikut :

- a. Lantai pertama : UGD, Lobby, Gudang Farmasi, Dapur, Laundry, Radiologi, IPRS, Cafe, Poliklinik, dan Lokers
- b. Lantai Kedua : Farmasi, Laboratorium, Bank Darah, MedicalRecord, Ruang dokter, Haemodialisa, Poliklinik, dan Cafe
- c. Lantai ketiga : CSSD, Central Operation, Rehabilitasi Medik, medical Check Up dan Cafe
- d. Lantai Keempat : Auditorium, ICCU, ICU, One Day Care, NICU, PICU, kebidanan, Rawat Inap Klas III
- e. Lantai Kelima : Rawat inap kls III, Nurse Station dan Ruang Tunggu keluarga.
- f. Lantai Keenam : Rawat Inap klas III, Rawat Inpa Klas II, Nurse Station dan Ruang Tunggu Keluarga (60 % TT untuk Klas III)
- g. Lantai Ketujuh : Rawat Inap Klas II, Rawat Inap Klas I, Nurse Station dan Ruang Tunggu Keluarga.
- h. Lantai Kedelapan : Rawat Inap Klas VIP, Nurse Station, Ruang Tunggu Keluarga serta Ruang

Kantor (Managemen dan Administrasi)
Gedung Rumah Sakit di lengkapi area parkir dan taman.

2. Fasilitas PDAM dan PLN

Pelayanan listrik di RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu menggunakan 85 KVAdan sebagai listrik cadangan tersedia mesin gensetsedangkan penyediaan air bersih oleh PDAM tersedia 8 meteran.

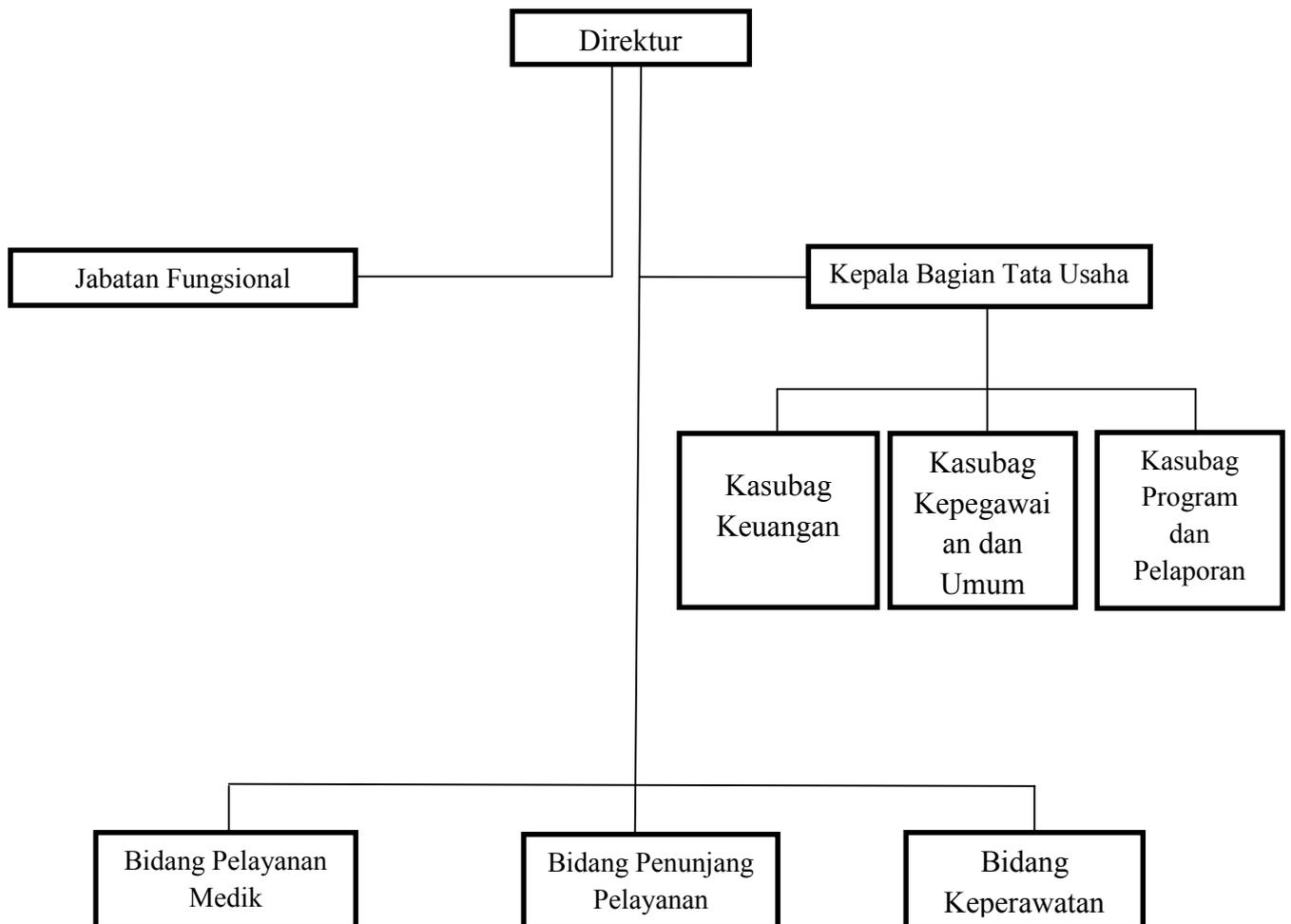
3. Pembiayaan

Tabel 4.5
Pembiayaan

NO	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	APBD Retribusi	17.162.424.500	19.279.670.352	112,34
	Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai	10.020.564.000	9.787.565.706	97,67
	Belanja Langsung 1.Belanja Pegawai	96.759.000	85.930.000	88,80
	2.Belanja Barang dan Jasa	31.062.503.269	29.718.835.290.	95,67
	3.Belanja Modal -peralatan dan Mesin	1.716.118.000	1.692.995.600	98,65

E. Struktur Organisasi dan Job Description

Gambar 4.2
Bagan Struktur Organisasi
RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng



Tugas pokok dari Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu adalah melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan, yang dilaksanakan secara serasi terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan

dan melaksanakan upaya rujukan. Sementara itu fungsi RSUD

Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu Bantaeng adalah :

- a. Penyelenggaraan pelayanan medik
- b. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik
- c. Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan
- d. Penyelenggaraan pelayanan rujukan
- e. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- f. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan
- g. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng No. 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2009 Struktur Organisasi RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng terdiri dari :

1. Direktur
2. Kepala Bagian Tata Usaha
 - Kasubag Keuangan
 - Kasubag Kepegawaian dan Umum
 - Kasubag Program dan Pelaporan
3. Kepala Bidang Pelayanan Medik
4. Kepala Bidang Penunjang Pelayanan
5. Kepala Bidang Keperawatan
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas sesuai dengan Peraturan Bupati Bantaeng nomor 38 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

1. Direktur

RSUD dipimpin oleh seorang Direktur yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis daerah di Bidang pengelolaan RSUD sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direktur mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengelolaan RSUD,
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di Bidang Pengelolaan RSUD,
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang pengelolaan RSUD,
- d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi,
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bagian Tata Usaha

Kepala bagian tata usaha mempunyai tugas mengkoordinasikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas ketata usahaan meliputi keuangan, kepegawaian, program dan pelaporan, serta pemberian pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkup badan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, bagian tata usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis bagian keuangan, kepegawaian, serta program dan pelaporan,
- b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bagian keuangan, kepegawaian, serta program dan pelaporan,
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pelayanan administrasi dan fungsional kepada seluruh satuan organisasi dalam Lingkup Badan,
- d. Pengkoordinasian, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi program dan kegiatan Lingkup Badan,
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1 Kasubag Keuangan

Kasubag keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan tugas keuangan meliputi penyusunan anggaran, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan dan pelaporan anggaran, dan tugas keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bagian administrasi keuangan.

Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis Sub Bagian Keuangan,

- b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Bagian Keuangan meliputi penyusunan anggaran, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan anggaran,
- c. Pengkoordinasian, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan,
- d. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas bagian keuangan,
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala tata usaha sesuai tugas dan fungsinya.

2.2 Kasubag Kepegawaian dan Umum

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan tugas kepegawaian, meliputi pengelolaan tugas rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, protokol, perjalanan dinas, tata laksana, perlengkapan dan aset, kepegawaian dan tugas umum lainnya, serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Bagian Administrasi umum dan Kepegawaian.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis Sub Bagian Kepegawaian dan Umum,
- b. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian meliputi pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, protokol

perjalanan dinas, tatalaksana, perlengkapan dan aset, kepegawaian dan tugas umum lainnya,

- c. Pengkoordinasian pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum,
- d. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Umum dan Kepegawaian
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan tugas fungsinya.

2.3 Kasubag Program dan Pelaporan

Bagian Program dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan tugas program dan pelaporan meliputi penyusunan program/kegiatan, jadwal pelaksanaan program/kegiatan, penyusunan laporan, dan tugas program dan penyusunan lainnya, serta melaporkan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan administrasi program dan pelaporan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis Sub Bagian Program dan Pelaporan,
- b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bagian program dan pelaporan meliputi pengelolaan urusan penyusunan program/kegiatan, jadwal pelaksanaan program/kegiatan, dan penyusunan laporan,

- c. Pengkoordinasian, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Pelaporan,
 - d. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas bagian program dan pelaporan,
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Kepala Bidang Pelayanan Medik

Bidang Pelayanan Medik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengelola, dan mengkoordinasikan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Medik serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis Bidang Pelayanan Medik,
- b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Medik,
- c. Pengkoordinasian, pengawasan, dan pengendalian, pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Medik,
- d. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Medis,
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Penunjang Pelayanan

Bidang penunjang pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengelola, dan mengkoordinasikan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas Bidang Penunjang Pelayanan serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Penunjang Pelayanan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis Bidang Penunjang Pelayanan,
- b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Bidang Penunjang Pelayanan,
- c. Pengkoordinasian, pengawasan, dan pengendalian, pelaksanaan tugas Bidang Penunjang Pelayanan,
- d. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Penunjang Pelayanan,
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Keperawatan

Bidang Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengelola, dan mengkoordinasikan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas Bidang Keperawatan serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Keperawatan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis Bidang Keperawatan,
- b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Bidang Keperawatan,
- c. Pengkoordinasian, pengawasan, dan pengendalian, pelaksanaan tugas Bidang Keperawatan,
- d. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Keperawatan,
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Siklus Transaksi Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu KAbupaten Bantaeng

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan komponen vital dalam sistem informasi manajemen. SIA menjadi pendukung semua aktivitas pelayanan dengan mengedepankan tiga fungsi utama, yaitu:

- Pengumpulan, pemrosesan, dan penyimpanan seluruh data transaksi rumah sakit;
- Transformasi data menjadi informasi yang dipakai oleh manajemen untuk pengambilan keputusan dan melakukan pengendalian; dan
- Kontrol internal terhadap aset-aset rumah sakit sehingga data yang disimpan menjadi akurat dan terpercaya (*reliable*).

Meskipun hanya bersifat sebagai pendukung dalam rumah sakit, SIA mampu menjadikan kelima aktivitas utama rumah sakit menjadi efektif dan efisien. Kelima aktivitas tersebut terangkum dalam siklus transaksi rumah sakit, yaitu siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus pelayanan, dan siklus keuangan, dan siklus pelaporan keuangan.

1. Siklus pendapatan terkait dengan pemberian jasa pelayanan rumah sakit kepada pasien atau pihak lain dan penerimaan pembayaran pasien atau tagihan dari pihak lain.
2. Siklus pengeluaran terkait dengan pengadaan barang dan/atau jasa dari

pihak lain dan pelunasan utang dan kewajibannya.

3. Siklus produksi/pelayanan terkait dengan transformasi sumber daya rumah sakit menjadi jasa pelayanan rumah sakit.
4. Siklus keuangan terkait dengan perolehan dan pengelolaan *capital fund* (dana modal), seperti modal kerja (sumber dana kas atau dana likuid lainnya) dan sumber dana jangka panjang.
5. Siklus pelaporan keuangan tidak terkait dengan siklus operasi (*operating cycle*) sebagaimana empat siklus pertama di atas. Siklus ini memperoleh data operasi dan akuntansi dari siklus yang lain dan memprosesnya menjadi laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.

B. Bagan Perkiraan Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng

a. Perkiraan Akun

Bagan Perkiraan adalah daftar yang dibuat dari rekening yang digunakan oleh badan usaha untuk mendefinisikan setiap barang atau uang yang dihabiskan atau diterima. Hal ini digunakan untuk mengatur entitas keuangan dan untuk memisahkan pengeluaran, pendapatan, aset dan kewajiban untuk memberikan pihak yang berkepentingan pemahaman yang lebih baik tentang kesehatan entitas keuangan.

Dalam suatu sistem akuntansi perusahaan, pemberian kode perkiraan akuntansi sangat tergantung pada keanekaragaman transaksi dan jumlah transaksi yang terjadi. Semakin banyak dan kompleksitas transaksi

yang terjadi akan menyebabkan semakin banyak kode perkiraan akuntansi yang akan digunakan.

Berikut ini kode akun perkiraan yang digunakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu Bantaeng :

NAMA PERKIRAAN	KODE
Asset	
Kas dan Setara Kas	11.01.01
Kas Bendahara Penerimaan	11.01.02
Rekening Bank Rakyat Indonesia	11.01.03
Piutang Pasien BPJS	11.03.01
Piutang Pasien Jamkesda	11.03.02
Persediaan Obat-Obatan	11.04.01
Persediaan Bahan/alat Kesehatan Habis Pakai	11.04.02
Persediaan O2	11.04.03
Persediaan ATK	11.04.04
Persediaan Barang Cetakan	11.04.05
Persediaan Bahan Kering	11.04.06
Persediaan Alat/Bahan Kebersihan	11.04.07
Persediaan Komponen Listrik dan Elektronik	11.04.08
Persediaan Kantong Plastik/Plastik Kemasan Obat	11.04.09
Persediaan Perlengkapan dapur	11.04.10
Persediaan Alat Teknik Bangunan	11.04.11
Persediaan Kantong Darah	11.04.12
Tanah	13.01.01
Gedung dan Bangunan	13.02.01
Peralatan dan Mesin	13.03.01
Jalan, Irigasi, dan Jembatan	13.04.01
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	13.14.02
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	13.14.03
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jembatan	13.14.04
Asset Tidak Berwujud	16.01.01
Asset Lainnya	16.01.02
Liabilitas	
Hutang Obat	21.01.01
Hutang BHP	21.01.02
Hutang Oksigen	21.01.03

NAMA PERKIRAAN	KODE
Hutang BMK	21.01.04
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	21.04.01
Biaya Jasa Pelayanan JKD	21.04.02
Biaya Jasa Pelayanan Medis & Non Medis BPJS	21.04.03
Biaya Jasa Pelayanan Umum	21.04.04
Ekuitas	
Ekuitas Tidak Terikat	31.01.01
Ekuitas Terikat Temporer	31.02.01
Ekuitas Terikat Permanen	31.03.01
Pendapatan	
Pendapatan IGD Umum	81.01.01
Pendapatan Instalasi Rawat Jalan Umum	81.02.01
Pendapatan Instalasi Rawat Jalan Pihak Ke III	81.02.02
Pendapatan Instalasi Rawat Jalan BPJS	81.02.04
Pendapatan Instalasi Rawat Inap Umum	81.03.01
Pendapatan Instalasi Rawat Inap BPJS	81.03.02
Pendapatan Instalasi Rawat Inap Pihak ke III	81.03.03
Pendapatan Instalasi Rawat Inap Jamkesda	81.03.04
Pendapatan Kamar Operasi Umum	81.04.01
Pendapatan Kamar Operasi Jamkesda	81.04.02
Pendapatan kamar Operasi Pihak ke III	81.04.03
Pendapatan Fisioterapi Umum	81.05.01
Pendapatan Laboratorium Umum	81.06.01
Pendapatan Laboratorium Jamkesda	81.06.02
Pendapatan Laboratorium Pihak Ke III	81.06.03
Pendapatan Radiologi Umum	81.07.01
Pendapatan Radiologi Jamkesda	81.07.02
Pendapatan Radiologi Pihak III	81.07.03
Pendapatan Instalasi Transfusi Darah Umum	81.08.01
Pendapatan Instalasi Transfusi Darah Pihak ke III	81.08.03

NAMA PERKIRAAN	KODE
Pend. Penjualan Obat & Bhp Farmasi Umum	81.09.01
Pend. Penjualan Obat & Bhp Farmasi Pihak Ke III	81.09.03
Pend. Penjualan Obat & Bhp Farmasi BPJS	81.09.04
Pendapatan Ambulance Umum	81.10.01
Pendapatan Ambulance Pihak Ke III	81.10.03
Pendapatan Ambulance BPJS	81.10.04
Pendapatan Pendaftaran Pasien	81.11.01
Pendapatan Keterangan Kesehatan	81.11.02
Pendapatan Keterangan Narkoba	81.11.03
Pendapatan Diklat	88.01.01
Pendapatan Bunga Bank	88.01.03
Pendapatan Retribusi Parkir	88.01.04
Pendapatan Lainnya	88.01.10
Belanja Pegawai	
Biaya Honorarium	91.01.02
Biaya Lembur	91.01.05
Biaya Jasa Pelayanan medik dan Non Medik	91.03.03
Biaya Jasa Pendidikan	91.03.04
Belanja Barang dan Jasa	
Persediaan Obat-Obatan	15.01.10
Persediaan Bahan/Alat Kesehatan Pakai Habis	15.02.01
Persediaan O2	15.02.02
Persediaan Bahan Reagen Labortorium	15.02.03
Persediaan ATK	15.04.01
Persediaan Barang Cetakan	15.04.02
Perangko dan Materai	15.04.03

NAMA PERKIRAAN	KODE
Persediaan Bahan Kering	15.05.02
Persediaan Alat/Bahan Kebersihan	15.06.04
Persediaan Bahan Komponen Listrik	15.06.06
Persediaan Kantong Plastik/Plastik Kemasan Obat	15.06.07
Persediaan Perlengkapan Dapur	15.06.08
Persediaan Alat Teknik Bangunan	15.07.04
Persediaan Kantong Darah	15.09.01
Biaya Bahan Makanan Basah Pasien	91.02.03
Biaya Bahan Gas Elpiji	91.02.04
Biaya Bahan Bakar Minyak	91.02.06
Biaya Pembelian Linen Rumah Sakit	91.02.08
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Medik	91.04.01
Pemeliharaan Mobil Ambulance/Mobil Jenazah	91.04.02
Pemeliharaan bangunan/Gedung Rumah Sakit	91.04.03
Pemeliharaan Kalibrasi	91.04.04
Biaya Distribusi Sampah/Septic Tank	91.05.04
Biaya Jasa Transportasi dan Akomodasi	91.05.06
Biaya Jasa Tenaga Ahli /narasumber	91.05.07
Biaya Surat Tanda Nomor Kendaraan	91.05.08
Biaya Jasa Kantor	91.05.09
Biaya Pakaian Kerja	91.05.10
Biaya Pajak Bumi dan Bangunan	91.05.14
Biaya Pelayanan Lainnya	91.09.01
Biaya Penggandaan	92.02.03
Biaya Langganan Media Cetak dan Elektronik	92.02.04
Biaya Makanan dan Minuman Pegawai	92.02.05

NAMA PERKIRAAN	KODE
Biaya surat Menyurat/Ekspedisi	92.02.06
Biaya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Non	92.03.01
Biaya Pemeliharaan Kendaraan Operasional	92.03.02
Biaya Pemeliharaan Peralatan & Perlengkapan	92.03.03
Biaya Bimbingan Teknis	92.04.04
Biaya jasa Akuntan Publik	92.04.05
Biaya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	92.04.08
Biaya Sewa Penginapan	92.04.17
Biaya Kontrakan Rumah Dokter Ahli	92.04.18
Biaya Perjalanan Dinas	92.09.01
Biaya Pendidikan & Pelatihan Formal	92.09.02
Biaya Administrasi Bank	93.02.01
Belanja Modal	
Alat-alat Angkutan/Kendaraan	31.03.02
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga Rumah Sakit	31.03.05
Alat-Alat Kedokteran	31.03.08
Pengadaan Komputer Notebook dan Printer	31.03.12
Projektor LCD	31.03.14
Pengadaan UPS	31.03.15
Mesin Foto Copy	31.03.16
Simrs	42.03.01

Tabel 5.6 Perkiraan Akun

b. Pengaruh Transaksi Pada Perkiraan(Akun)

Setiap transaksi keuangan yang terjadi akan menambah atau mengurangi nilai atau jumlah uang yang tercantum pada sisi debit atau kredit perkiraan-perkiraan tertentu. Pada dasarnya, naik turun atau penambahan dan pengurangan jumlah/ nilai uang pada sisi debit dan kredit secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut:

Nama Perkiraan	Bertambah	Berkurang
Harta/Asset	Debit	Kredit
Hutang/Aktiva	Kredit	Debit
Modal/Ekuitas	Kredit	Debit
a. Pengambilan Pribadi (Prive)	Debit	Kredit
b. Dividen	Debit	Kredit
Penghasilan/Pendapatan	Kredit	Debit
Biaya-biaya	Debit	Kredit

Tabel 5.7 Pengaruh Transaksi Pada Perkiraan

C. Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng

Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng disusun setiap akhir bulan yang terdiri dari neraca, laporan aktivitas dan catatan atas laporan keuangan. Sehubungan dengan judul skripsi yang penulis utarakan, maka

dalam penelitian ini penulis memerlukan data, yaitu laporan keuangan periode 1 Desember 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.

1. Neraca

Neraca adalah merupakan laporan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Neraca dalam laporan keuangan Rumah Sakit Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu aktiva dan passiva.

Aktiva digunakan untuk menyatakan sisa kas, bank, aktiva tetap, dan aktiva lain yang dimiliki oleh rumah sakit. Yang termasuk dalam aktiva Rumah Sakit Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu Bantaeng antara lain, kas, bank, kas bendahara, piutang, persediaan obat-obatan, persediaan lainnya, aktiva tetap, dan aktiva lainnya.

Passiva dibagi atas dua kelompok besar yakni kewajiban dan kekayaan bersih (ekuitas). Kewajiban terdiri atas hutang usaha, biaya yang masih harus dibayar, dan hutang lainnya yang diperkirakan selesai dalam waktu normal operasi perusahaan. Kekayaan bersih adalah sebesar total nilai aktiva dikurangi dengan total nilai kewajiban yang ada di awal periode.

Tabel 5.8 Neraca RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu Bantaeng

NO	URAIAN	TAHUN 2016
1	Asset	
	-Asset Lancar	Rp. 6.915717.160
	-Asset Tidak Lancar	Rp. 111.045.017128
	Total Asset	Rp. 117.960.734.289
2	Kewajiban	
	-Kewajiban Lancar	Rp. 5.252.075.707
3	Ekuitas	
	-Ekuitas Tidak Terikat	Rp. 112.708658582
	Total Kewajiban dan Ekuitas	Rp. 117.960.734.289

Neraca RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu Periode Desember 2016

Pada tahun anggaran Per 31 Desember 2016 pada pos asset, jumlah asset lancar sebesar Rp. 6.915717.160, asset tidak lancar sebesar Rp. 111.045.017128. Maka total asset RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu pada tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 117.960.734.289. Pada pos kewajiban, jumlah kewajiban lancar sebesar Rp. 5.252.075.707, dan jumlah ekuitas sebesar Rp.112.708658582. Maka total kewajiban dan ekuitas adalah sebesar Rp.117.960.734.289.

2. Laporan Aktivitas

Laporan aktivitas adalah laporan yang menyajikan daftar ikhtisar hasil dan beban suatu badan usaha selama periode tertentu. Laporan aktivitas disusun untuk mengukur kemampuan dan perkembangan rumah sakit dalam menjalankan fungsinya sehubungan dengan sifat kegiatan usahanya. Sama halnya dengan neraca, laporan aktivitas disusun pada setiap akhir bulan.

Adapun komponen dari laporan aktivitas yang disajikan oleh pihak rumah sakit adalah seluruh pendapatan yang diperoleh oleh rumah sakit, pengurang penghasilan, dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh rumah sakit.

Pendapatan rumah sakit diperoleh dari pendapatan umum, pendapatan jamkesda, pendapatan BPJS, pendapatan jasa raharja, dan pendapatan asuransi jiwa. Sedangkan biaya-biaya yang dikeluarkan pihak rumah sakit antara lain biaya operasiona, biaya administrasi dan umum, dan lain-lain.

**Tabel 5.9 Laporan Aktivitas RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu
Bantaeng**

NO	URAIAN	2016
1	Pendapatan BLUD	Rp. 35.800.787.617
2	Pendapatan Lain-lain BLUD	Rp. 16.549.701
3	Beban BLUD	Rp. (30.985.266.401)
4	Pendapatan APBD	Rp. 85.855.501.355
5	Beban APBD	Rp. (25.681.798.786)
6	Aset Neto Awal Tahun	Rp. 47.702.885.096
7	Aset Neto Akhir Tahun	Rp. 112.708.658.582

Laporan Aktivitas RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu Bantaeng periode 2016

Pendapatan BLUD RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu pada tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 35.800.787.617, dan pendapatan lain-lain BLUD sebesar Rp. 16.549.701. Beban BLUD rumah sakit sebesar Rp. (30.985.266.401), sedangkan pendapatan APBD sebesar Rp. 85.855.501.355, dan beban APBD sebesar Rp. (25.681.798.786).

3. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah suatu laporan keuangan yang berisikan pengaruh kas dari kegiatan operasi, kegiatan transaksi investasi dan kegiatan transaksi pembiayaan/pendanaan serta kenaikan atau penurunan bersih dalam kas suatu perusahaan selama satu periode. Tujuan pelaporan arus kas adalah

memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Arus kas diklasifikasikan kedalam menjadi 4 (empat) aktivitas, yaitu:

1. Aktivitas Operasi
2. Aktivitas Investasi
3. Aktivitas Pendanaan

**Tabel 5.10 Laporan Arus Kas RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu
Bantaeng**

No.	Transaksi	2016
1	Arus Masuk Dari Aktivitas Operasi	Rp. 126.557.987.521,00
2	Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Operasi	Rp. 67.944.757.510,14
3	Arus Masuk Dari Aktivitas Investasi	-
4.	Arus keluar Dari Aktivitas Investasi	Rp. 111.045.017.128,42
5	Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Pendanaan	Rp. 52.502.525.505,56
6	Arus Kas keluar Dari Aktivitas Pendanaan	-
	Kenaikan (penurunan) Kas Setara Kas	Rp. 70.738.338,52
	Kas dan setara kas akhir	Rp. 70.738.338,52

Laporan Arus Kas RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu Bantaeng periode
desember 2016

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi RSUD Prof.DR.H.M.Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng sebesar Rp. 126.557.987.521,00 yang berasal dari pendapatan-pendapatan perusahaan, hutang usaha, dan biaya yang masih harus dibayar, dan arus kas keluar dari aktivitas operasi sebesar Rp. 67.944.757.510,14 yang berasal dari beban-beban yang dikeluarkan perusahaan selama suatu periode, piutang usaha, dan persediaan. Pada aktivitas investasi arus kas masuk tahun anggaran 2016 tidak ada, arus kas keluar dari aktivitas investasi sebesar Rp. 111.045.017.128,42 yang berasal dari gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, dan jembatan, serta asset lain dan asset tidak berwujud.

4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Oleh karena itu, laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu Bantaeng membuat catatan atas laporan keuangan yang berisi mengenai:

1. Penjelasan Umum Perusahaan
-Pendirian dan Informasi Lainnya

- Tugas Pokok dan fungsi
 - Struktur Organisasi
 - Nama Pejabat Pengelola
 - Sumber Daya Manusia
2. Kebijakan Akuntansi
- Dasar Penyajian Laporan Keuangan
 - Kas dan Setara Kas
 - Piutang Pelayanan
 - Persediaan
 - Aset Tetap
 - Aset Tidak Berwujud
 - Ekuitas
 - Pengakuan Pendapatan dan Beban
3. Penjelasan Pos-pos Neraca dan Laba Rugi

**D. Evaluasi Penerapan PSAK No. 45 Pada Rumah Sakit Umum Daerah
Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu Bantaeng**

Dalam mengevaluasi penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 (PSAK No. 45) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu Bantaeng yang Berstatus Badan Layanan Umum Daerah serta penyusunan anggaran rumah sakit Badan Layanan Umum.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU pasal 26 ayat (2) yang berbunyi:

“Akuntansi dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia”

Maka Standar Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan rumah sakit adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Standar Pelaporan dibuat dengan tujuan agar laporan keuangan organisasi nirlaba dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dan memiliki daya banding yang tinggi.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, dengan disahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU), maka status rumah sakit pemerintah kini berubah menjadi Badan Layanan Umum.

Serta ketentuan mengenai Badan Layanan Umum seperti: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1981/MENKES/SK/XII/2010 tentang Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum Rumah Sakit.

Penulis ingin membandingkan bentuk dan susunan laporan keuangan yang disusun oleh pihak rumah sakit Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu Bantaeng dengan PSAK Nomor 45 serta pedoman PMK dan KMK. Laporan yang terdapat dalam laporan keuangan yang ditetapkan oleh PSAK No. 45 yaitu:

1. Laporan Posisi Keuangan

Dalam laporan keuangan yang disusun oleh RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu Bantaeng, terdapat laporan posisi keuangan yang disajikan kedalam bentuk neraca yang memberikan informasi mengenai posisi keuangan rumah sakit tersebut pada akhir setiap periode. Rumah sakit menyajikan neraca dengan menampilkan perkiraan aktiva di bagian atas dan passiva dibagian bawah, serta menampilkan catatan pada sebelah kiri aktiva dan passiva.

a. Aktiva

PSAK No. 45 telah mengatur bahwa aktiva disajikan berdasarkan urutan likuiditasnya dan dikelompokkan kedalam aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Dalam hal pengurutan aktiva berdasarkan likuiditasnya

b. Passiva

Passiva pada neraca rumah sakit digunakan untuk menyajikan kelompok kewajiban dan kekayaan bersih (ekuitas). Penyajian kewajiban menurut PSAK No. 45 adalah diurutkan berdasarkan tanggal jatuh tempo dan dikelompokkan kedalam jangka pendek dan jangka panjang sedangkan kekayaan bersih dikelompokkan menurut ada atau tidaknya pembatasan oleh penyumbang yaitu terikat secara permanen, terikat secara temporer, dan tidak terikat.

Penyajian perkiraan passiva dalam neraca rumah sakit diurutkan berdasarkan jatuh tempo kewajiban dan diikuti dengan penyajian jumlah kekayaan bersih dan jumlah keuntungan rumah sakit untuk periode yang

bersangkutan. Pengelompokan tersebut sebagaimana telah diatur dalam PSAK No. 45 telah diterapkan pada penyajian passiva rumah sakit.

2. Laporan Aktivitas

Laporan aktivitas pada suatu organisasi nirlaba memiliki kedudukan yang sangat penting. Laporan aktivitas ini akan memberikan informasi mengenai perubahan aktiva bersih perusahaan, informasi dan pengelompokan pendapatan dan beban serta informasi mengenai pemberian jasa.

RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng menyusun laporan aktivitas sebagaimana yang ditentukan oleh PSAK Nomor 45 yang menyajikan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih, hubungan antar transaksi dan peristiwa lain, dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa dalam suatu periode.

Perubahan aktiva bersih, pengelompokan pendapatan dan beban, program jasa dan klasifikasi fungsional pun sudah jelas dan disajikan dalam laporan aktivitas RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu.

3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Laporan ini digunakan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menggunakan arus tersebut. Penilaian atas kemampuan menghasilkan kas dikaitkan dengan aktivitas yang dijalankan perusahaan, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan

pendanaan. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Penyajian arus kas pada RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu telah disajikan sesuai dengan PSAK Nomor 45 dengan mengelompokkan aktivitas-aktivitas yang dijalankan perusahaan kedalam tiga aktivitas bagian yaitu, aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.

4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan, merupakan bagian yang tidak terpisah dari laporan-laporan di atas. Tujuan pemberian catatan ini agar seluruh informasi keuangan yang dianggap perlu untuk diketahui pembacanya sudah diungkapkan. Catatan atas laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan.

Dalam penyajian laporan keuangan RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu Bantaeng, terdapat catatan atas laporan keuangan dimana menjelaskan tentang penjelasan-penjelasan umum dari rumah sakit, kebijakan akuntansi dari setiap akun-akun, dan penjelasan pos-pos neraca dan laba rugi. Penjelasan tersebut sebagaimana telah diatur dalam PSAK Nomor 45 telah diterapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan berbagai uraian tentang laporan keuangan pada RSUD Prof.Dr.H.M. Anwar Makkatutu Bantaeng dan evaluasi pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng merupakan rumah sakit dengan pelayanan rumah sakit yang baik dalam rohani maupun jasmani, turut membantu program pemerintah dalam bidang kesehatan serta dalam pelayanannya tidak akan membeda-bedakan suku bangsa dan agama.
2. Penyajian laporan keuangan RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba Berstatus Badan Layanan Umum yang terdiri atas Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

B. Saran

Berikut ini beberapa saran pada penelitian ini:

1. Dengan melihat hasil analisis PSAK No. 45 dapat diterapkan pada Badan Layanan Umum. Dimana Badan Layanan Umum merupakan sebuah instansi pemerintah, oleh karena hal tersebut, kami memberikan saran

kepada DSAK-IAI untuk merevisi paragraph 2 pada PSAK No. 45 agar PSAK No. 45 dapat diakomodir Badan Layanan Umum dalam penyusunan pelaporan keuangannya yang tujuannya dapat meningkatkan daya banding, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan negara.

2. Perlunya penyusunan sebuah standar akuntansi rumah sakit pemerintah yang berstatus Badan Layanan Umum dengan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia dalam rangka memenuhi amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Daftar Pustaka

- Ade Diyani Rizky, Yazid Yud Padmono. 2013. "Analisis Penerapan PSAK No. 45 Pada Yayasan Masjid Al Falah Surabaya". *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 2 No. 7*.
- Dwi Resha Ayu. 2014. "Rekonstruksi pelaporan keuangan organisasi nirlaba pada Yayasan Pendidikan Islam Indocakti Malang berdasarkan PSAK nomor 45". Fakultas Ekonomi Universitas Jember. <http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/55990/Resha%20Dwi%20Ayu%20P.M.1.pdf?sequence=1>. Skripsi. Tanggal akses 14 Februari 2017.
- Hendrawan Ronny. 2011. "Analisis Penerapan PSAK Nomor 45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba Pada Rumah Sakit Berstatus Badan Layanan Umum (Studi kasus RSUD Kota Semarang)". Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang. *Skripsi*.
- Ibrahim Ridwan, Tri Handayani. 2009. "Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 Pada Baitul Mal Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam". *JURNAL TELAAH & RISET AKUNTANSI Vol. 2. No. 2. Juli 2009 Hal. 183-197*.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2009. "Analisis Penerapan PSAK Nomor 45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba Pada Rumah Sakit Berstatus Badan Layanan Umum (Studi kasus RSUD Kota Semarang)". Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang. *Skripsi*.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2011. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 Organisasi Nirlaba. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 04 No. 1 (2015)*
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2011. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 15 No. 03 Tahun 2015*.
- Kiswandi. 2013. Defenisi Hipotesis penelitian. http://sportgameindonesia.blogspot.co.id/2013/07/contoh-skripsi-akuntansi-pajak-2013_2224.html. Diakses tanggal 14 Februari 2017.
- Korompis, Claudia W.M. 2014. "Penerapan PSAK No. 45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba Pada Sanggar Seni Budaya Logos Ma'kantar". *Jurnal*.
- M. L Samryn. 2014. *Pengantar Akuntansi*. Grafinfo. Jakarta

- Miftakul M Amin. 2015. "Rancang Bangun Sistem informasi Akuntansi Menggunakan Standar PSAK No. 45 Bagi Organisasi Nirlaba". *Jurnal Informanika, Volume 1 No. 2, Juli - Desember 2015*.
- Novia Husnia Yuhaida. 2015. "Penerapan laporan keuangan Organisasi Nirlaba berdasarkan PSAK nomor 45 (Studi Kasus pada Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Assalbiyah". Fakultas Ekonomi Universitas Jember. http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/62474/Husnia%20Novia%20Yuhaida%20-%20110810301037_1.pdf?sequence=1. Skripsi. Tanggal akses 14 Februari 2017.
- Novrina Angelia Meilani Tinungki. Rudy J. Pusung. 2014. "Penerapan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Berdasarkan PSAK No. 45 pada Panti Sosial Tresna Werdha Hana". *Jurnal EMBA 809 Vol.2 No.2 Juni 2014, Hal. 809-819*.
- Nur Erawati Diana. 2015. "Rekonstruksi Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba Pada Yayasan Ibnu Katsir Jember Berdasarkan PSAK Nomor 45". *Artikel Ilmiah Mahasiswa 2015*.
- Nurlaela Siti. Mutmainah. 2014. "Implementasi PSAK No. 45 dalam Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba Berstatus Badan Layanan Umum". *Jurnal Paradigma Vol. 12, No. 01, Februari – Juli 2014 – 76*.
- Purnamasari Fitri. 2014. "Analisis Penerapan PSAKNomor45 pada Yayasan di Kota Malang". Fakultas Ekonomi UM. <http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/akutansi/article/view/32928>. Skripsi. Tanggal akses 14 Februari 2017.
- Repi Wahyu. Dkk. 2015. "Analisis Penerapan PSAK No. 45 (revisi 2011) Tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba Pada Stikes Muhammadiyah Manado". *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 15 No. 03 Tahun 2015*.
- Rian Ignasius Gultom. Agus T. Poputra. 2015. "Analisis Penerapan PSAK No. 45 Tentang Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Dalam Mencapai Transparansi dan Akuntabilitas Kantor Sinode GMIM". *Jurnal EMBA 527 Vol.3 No.4 Desember 2015, Hal. 527-537*.
- Riyantika Dwi syabaniyah. 2011. Metodologi penelitian. <http://dwiriyantikasyabaniyah.blogspot.co.id/p/definisi-operasional-variable.html>. Tanggal Akses 14 Februari 2017.
- Sugiri Slamet Sodikin. Bogat Agus Riyono. 2014. *Pengantar Akuntansi 1*. Upp Stim Ykpn. Yogyakarta.

- Sugiyono. 2008. Pengertian populasi dan sampel menurut para ahli. <http://globallavebookx.blogspot.co.id/2015/03/pengertian-populasi-dan-sampel-menurut-ahli.html>. Tanggal akses 25 Februari 2017.
- Sulistiyoningsih Dewi. Ikhsan Budi Riharjo. 2013. “Implementasi PSAK Nomor 45 Dalam Pelaporan Keuangan Pada Yayasan Lembaga Pendidikan Zainuddin”. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 2 No. 1*.
- Utomo Riyanto. Indah Nur Qomariah. 2014. “Penerapan Psak No 45 Pada Laporan Keuangan Yayasan Penolong Anak Yatim Dan Miskin Perguruan Darul Islam Di Kota Gresik Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan”. *Jurnal Fakultas Ekonomi Volume 03 No. 02 Hal. 230-241*.
- Wahyuni Sri. 2010. Variabel dan Defenisi Operasional Variabel. <http://library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/2/--sriwahyuni-86-5-bab3.pdf>. Tanggal akses 14 Februari 2107.
- Wikipedia. Laporan Keuangan. https://id.wikipedia.org/wiki/Laporan_keuangan. Tanggal akses 14 februari 2017.
- Wiratna V Sujarweni. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Yuda Hendra. 2016. PSAK Nomor 45 Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. <https://feelinbali.blogspot.co.id/2016/07/psak-nomor-45-pelaporan-keuangan.html>. tanggal akses 14 Februari 2017.

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF.DR.H.M.ANWAR MAKKATUTU**

PER '31 DESEMBER 2016



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
RSUD PROF. DR. H. M. ANWAR MAKKATUTU

Jalan Teratai Nomor 20 Telp.0413-21004 Fax.0413-21786

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN PER' 31 DESEMBER 2016
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.DR.H.M.ANWAR MAKKATUTU

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. Sultan, M.Kes
Jabatan : Direktur
No Telepon : 0413-21004
Alamat Kantor : Jl.Teratai No.20 Kabupaten Bantaeng

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **RSUD Prof H.M Anwar Makatutu**.
2. Laporan keuangan **RSUD Prof H.M Anwar Makatutu** telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan **RSUD Prof H.M Anwar Makatutu** telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan keuangan **RSUD Prof H.M Anwar Makatutu** tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam **RSUD Prof H.M Anwar Makatutu**.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Bantaeng, 09 Februari 2017
Atas nama dan mewakili direksi

dr. Sultan, M.Kes
Direktur

DAFTAR ISI

	Halaman
SURAT PERNYATAAN DIREKSI	I
DAFTAR ISI	II
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	1
LAPORAN KEUANGAN	
- NERACA <i>Per' 31 Desember 2016</i>	2
- LAPORAN AKTIVITAS <i>Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016</i>	3
- CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN <i>Per' 31 Desember 2016</i>	4

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF.DR.H.M.ANWAR MAKKATUTU
NERACA
PER '31 DESEMBER 2016
(Disajikan dalam rupiah)

<u>ASET</u>		
	<u>Catatan</u>	<u>2016</u>
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas	3	70.738.388
Piutang Usaha	4	5.148.009.048
Persediaan	5	1.696.969.724
Jumlah Aset Lancar		6.915.717.160
ASET TIDAK LANCAR		
Aset Tetap Bersih	6	110.811.438.098
Aset Lain-lain	7	233.579.030
Jumlah Aset Tidak Lancar		111.045.017.128
JUMLAH ASET		117.960.734.289
<u>LIABILITAS DAN EKUITAS</u>		
KEWAJIBAN LANCAR		
Hutang Usaha	8	1.879.578.890
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	9	3.372.496.817
Jumlah Kewajiban Lancar		5.252.075.707
EKUITAS		
Ekuitas Tidak Terikat	10	
Ekuitas Awal		47.702.885.096
Surplus dan (Defisit) Tahun Lalu		-
Surplus dan (Defisit) Tahun Berjalan		65.005.773.486
Jumlah Ekuitas Tidak Terikat		112.708.658.582
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		117.960.734.289

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF.DR.H.M.ANWAR MAKKATUTU
LAPORAN AKTIVITAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016
(Disajikan dalam rupiah)

	<u>Catt</u>	<u>2016</u>
PENDAPATAN BLUD	11	35.800.787.617
PENDAPATAN LAIN-LAIN BLUD		16.549.701
BEBAN BLUD		
Beban Operasional Pelayanan		(27.965.424.612)
Beban Administrasi dan Umum		(3.015.704.364)
Beban Lain-lain		(4.137.425)
Jumlah Beban		<u>(30.985.266.401)</u>
Kenaikan Aset Neto BLUD		4.832.070.917
PENDAPATAN APBD	12	85.855.501.355
BEBAN APBD		<u>(25.681.798.786)</u>
Kenaikan Aset Neto APBD		<u>60.173.702.569</u>
Aset Neto Awal Tahun		47.702.885.096
Aset Neto Akhir Tahun		<u>112.708.658.582</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF.DR.H.M.ANWAR MAKKATUTU
CATATAN LAPORAN KEUANGAN
PER '31 DESEMBER 2016
(Disajikan dalam rupiah)

1. PENJELASAN UMUM

a. Pendirian dan Informasi Lainnya

RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu Bantaeng didirikan pada tahun 1921 dan merupakan warisan Pemerintah Belanda, sehingga sebagian bangunannya terutama pada ruang perawatan masih merupakan bangunan yang berada di jantung kota Bantaeng dengan alamat Jalan Teratai Nomor 20 ,terletak di sebelah selatan Propinsi Sulawesi Selatan.

Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu Bantaeng sebagai rumah sakit milik pemerintah daerah dan merupakan satu-satunya pusat rujukan di Kab.Bantaeng dalam pemberian pelayanannya senantiasa berupaya untuk memberikan yang terbaik untuk pelanggannya yang bukan hanya melayani masyarakat Kabupaten Bantaeng saja akan tetapi juga melayani masyarakat tetangga seperti Kab.Jeneponto dan Kab.Bulukumba.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI. Nomor 1284/Menkes/SK/XII/2004 tanggal 17 Desember 2004, kelas RSUD PROF.DR.H.M.ANWAR MAKKATUTU menjadi rumah sakit kelas C.
Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 061/372/X/2015, tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah PROF.DR.H.M.ANWAR MAKKATUTU telah berubah menjadi BLUD penuh.

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2007 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Prof.Dr.H.M. Anwar Makkatutu Bantaeng adalah:

Melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan.

Fungsi RSUD Prof.Dr.H.M. Anwar Makkatutu adalah :

- Penyelenggaraan Pelayanan Medik
- Penyelenggaraan Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik
- Penyelenggaraan Pelayanan dan Asuhan Keperawatan
- Penyelenggaraan Pelayanan Rujukan
- Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
- Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan
- Penyelenggaraan administrasi Umum dan Keuangan

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF.DR.H.M.ANWAR MAKKATUTU
CATATAN LAPORAN KEUANGAN
PER '31 DESEMBER 2016
(Disajikan dalam rupiah)

c. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi Kantor RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu Bantaeng sesuai Peraturan Daerah No.07 Tahun 2007 terdiri dari :

- a. Direktur
- b. Kepala Bagian Tata Usaha
 - Kasubag Keuangan
 - Kasubag Kepegawaian
 - Kasubag Program dan Pelaporan
- c. Kepala Bidang Pelayanan Medik
- d. Kepala Bidang Penunjang Pelayanan
- e. Kepala Bidang Keperawatan
- f. Kelompok jabatan fungsional

d. Nama pejabat Pengelola RSUD Prof.Dr.H.M. Anwar Makkatutu

Direktur	: dr. Sultan, M.Kes
- Kepala Bagian Tata Usaha	: Hj. Ida Fitri, SKM, M.Kes
- Kepala Bidang Pelayanan Medis	: dr. Hikmawaty
- Kepala Bidang Penunjang Pelayanan	: Muhajir, SKM, M.Kes
- Kepala Bidang Perawatan	: Kasmawaty, S.Kep
- Kasubag Umum & Kepegawaian	
- Kasubag Keuangan	: H. Abdul Kadir, S.Sos
- Kasubag Program & Pelaporan	: Syamsul Masri, SKM, M. Kes

e. Sumber Daya Manusia

Jumlah tenaga keseluruhan yang ada di RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu Bantaeng pada tahun 2016 sebanyak 471 orang (PNS, Tenaga Kontrak, Tenaga Magang) dengan rincian sebagai berikut :

- Pegawai Negeri Sipil	211	Orang
- Pegawai Tenaga Kontrak	139	Orang
- Pegawai Tenaga Magang	121	Orang
Jumlah Pegawai	<u>471</u>	

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Kebijakan dan Prosedur Akuntansi Berpedoman kepada PP Nomor 71 tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Kapitalisasi Aset Tetap dan Penyusutan Aset Tetap Milik Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan.

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF.DR.H.M.ANWAR MAKKATUTU
CATATAN LAPORAN KEUANGAN
PER '31 DESEMBER 2016
(Disajikan dalam rupiah)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tanggal 23 Mei 2008, tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1981/MENKES/SK/XII/2010, tanggal 18 Desember 2010, tentang Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit.

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 71 tahun 2013, tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 70 tahun 2011 tentang Pedoman Kapitalisasi Aset Tetap dan Penyusutan Aset Tetap Milik Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan.

b. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas diakui pada saat diterima oleh BLU dan berkurang pada saat digunakan dan dicadangkan, kas dan setara kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal.

Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. Kas yang dibatasi penggunaannya merupakan saldo uang kas pada akhir periode akuntansi, tetapi bukan merupakan hak RSUD PROF.DR.H.M.ANWAR MAKKATUTU.

c. Piutang Pelayanan

Piutang dari pelayanan kesehatan diakui pada saat RSUD PROF.DR.H.M.ANWAR MAKKATUTU telah memberikan pelayanan kesehatan, namun pada akhir periode pelayanan belum melunasi pembayaran. Piutang dari pendapatan lainnya diakui pada saat terjadinya transaksi yang menimbulkan piutang dalam kegiatan pelayanan yang tidak termasuk dalam piutang dari pelayanan kesehatan.

Piutang pelayanan disajikan sebesar jumlah neto setelah dikurangi penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih dilakukan terhadap saldo piutang pada akhir tahun, untuk mengantisipasi terjadinya kerugian akibat tak tertagihnya piutang.

Berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-28/PB/2011, tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pada Satuan Kerja Kementerian Negara: penyisihan piutang tak tertagih tersebut digolongkan sebagai berikut:

- a. Penyisihan piutang tak tertagih yang umum, ditetapkan paling sedikit 5% (Lima Persen) dari piutang yang memiliki kualitas lancar.
 - b. Penyisihan piutang tak tertagih khusus, ditetapkan sebagai berikut:
 - 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar, setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
 - 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan, setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
 - 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet, setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
-

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF.DR.H.M.ANWAR MAKKATUTU
CATATAN LAPORAN KEUANGAN
PER '31 DESEMBER 2016
(Disajikan dalam rupiah)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

d. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan administratif dan pemberian pelayanan kesehatan.

Persediaan diakui pada saat perolehan sebesar biaya perolehan persediaan, meliputi biaya pembelian, biaya konversi dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipakai atau dijual. Persediaan berkurang pada saat dipakai, dijual, kadaluarsa.

Metode penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO). Nilai tercatat setiap persediaan berdasarkan klarifikasinya dengan memisahkan nilai persediaan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan dan nilai realisasi neto.

e. Aset Tetap

Aset Tetap merupakan aset berwujud, dicatat berdasarkan nilai buku, yaitu biaya perolehan (Acquisition Cost) setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Aset tetap disajikan dalam neraca sebesar biaya perolehannya disertai akumulasi penyusutan. Sedangkan biaya penyusutan aset tetap dihitung berdasarkan metode garis lurus (straight line Method) yang harus mencerminkan pola pemanfaatan aset BLU RSUD PROF.DR.H.M.ANWAR MAKKATUTU.

<u>Kelompok Aset Tetap</u>	<u>Umur Ekonomis</u>
- Alat Angkutan Darat Bermotor	7
- Alat Ukur	5
- Alat Pemeliharaan Tanaman / Penyimpanan	4
- Meja dan Kursi Kerja / Rapat	5
- Alat kantor	5
- Alat Rumah Tangga	7
- Peralatan Komputer	5
- Alat Studio	5
- Alat Komunikasi	5
- Alat Kesehatan	5
- Alat Laboratorium	8
- Bangunan Tempat Kerja	50
- Instalasi Air Bersih	30
- Instalasi Air Kotor	30
- Instalasi Gas	30
- Buku-buku Perpustakaan	3
- Barang Bercorak Kesenian	5

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF.DR.H.M.ANWAR MAKKATUTU
CATATAN LAPORAN KEUANGAN
PER '31 DESEMBER 2016
(Disajikan dalam rupiah)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

Aset tetap yang diperoleh dalam bentuk siap pakai, nilai perolehannya berdasarkan atas harga beli ditambah dengan semua biaya yang dikeluarkan sampai aset tetap siap digunakan, aset tetap tersebut dicatat pada waktu diterima RSUD PROF.DR.H.M.ANWAR MAKKATUTU.

Aset Tetap yang dibangun sendiri, nilai perolehannya didasarkan atas seluruh biaya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset yang bersangkutan dan dibukukan pada saat serah terima aset tersebut.

Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional dikeluarkan secara administratif dari pos aset tetap dan dibukukan pada aset lain-lain serta dicatat berdasarkan nilai perolehannya. Penilaian kembali (revaluasi) aset tetap dimungkinkan hanya, bila sudah diperoleh dasar yang otoratif. Dalam hal dilakukan penilaian kembali atas aset tetap, maka nilai aset tetap dinyatakan sebesar nilai setelah dilakukan revaluasi.

f. Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tidak berwujud meliputi: Software Computer, Lisensi dan Francise, Hak Cipta (Copyright), Hak Paten, Goodwill dan hak Lainnya, serta hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Aset tidak berwujud, diakui pada saat dikeluarkannya dana untuk memperoleh aset tersebut sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan untuk pengembangan diakui sebagai beban pengembangan yang ditanggungkan . Aset tidak berwujud berkurang pada saat diamortisasi sebesar jumlah alokasi yang sistematis. aset tidak berwujud disajikan sebagai aset sebesar biaya perolehannya dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilainya.

g. Ekuitas

Ekuitas adalah hak residual BLU atas aset setelah dikurangi seluruh kewajiban yang dimiliki. Ekuitas BLU terdiri atas tidak terikat, ekuitas temporer dan ekuitas terikat permanen.

1. Ekuitas Tidak Terikat

Ekuitas tidak terikat adalah ekuitas berupa sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu. Ekuitas tidak terikat meliputi:

- Ekuitas

Merupakan hak residual BLU yang merupakan selisih aset dan kewajiban pada saat pertama kali BLU ditetapkan, kecuali sumber daya ekonomi yang diperoleh untuk tujuan

- Surplus dan Defisit Tahun Lalu

Surplus dan defisit tahun lalu merupakan akumulasi surplus dan defisit pada periode-periode sebelumnya.

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF.DR.H.M.ANWAR MAKKATUTU
CATATAN LAPORAN KEUANGAN
PER '31 DESEMBER 2016
(Disajikan dalam rupiah)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

g. Ekuitas (Lanjutan)

1. Ekuitas Tidak Terikat (Lanjutan)

- Surplus dan Defisit Tahun Berjalan

Surplus dan defisit tahun berjalan berasal dari seluruh pendapatan setelah dikurangi seluruh biaya pada tahun berjalan

- Ekuitas Donasi Tidak Mengikat

Ekuitas donasi merupakan sumber daya yang diperoleh dari pihak lain, berupa sumbangan atau hibah yang sifatnya tidak mengikat.

2. Ekuitas Terikat Temporer

Ekuitas terikat temporer adalah ekuitas berupa sumber daya ekonomi yang penggunaannya dan/atau waktunya dibatasi untuk tujuan tertentu dan /atau jangka waktu tertentu oleh pemerintah atau donatur. Pembatasan tersebut dapat berupa pembatasan waktu dan/atau pembatasan penggunaan ekuitas tersebut oleh RSUD PROF.DR.H.M.ANWAR MAKKATUTU.

3. Ekuitas Terikat Permanen

Ekuitas terikat permanen adalah ekuitas berupa sumber daya yang penggunaannya dibatasi secara permanen untuk tujuan tertentu oleh pemerintah/donatur.

h. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan RSUD PROF.DR.H.M.ANWAR MAKKATUTU diklasifikasikan ke dalam:

1. Pendapatan Pelayanan Kesehatan

Pendapatan pelayanan kesehatan diakui pada saat pelayanan selesai diberikan atau hak untuk menagih timbul sehubungan dengan adanya layanan yang diberikan kepada masyarakat atau pihak lainnya. Jika salah satu syarat yang di atas tidak terpenuhi, maka pendapatan pelayanan kesehatan tidak diakui tetapi diungkapkan sebagai aset kontijensi. Pendapatan pelayanan kesehatan dan pendapatan lainnya dicatat sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima.

2. Hibah

Pendapatan hibah berupa barang diakui pada saat hak kepemilikan berpindah dan dicatat sebesar nilai wajar pada saat diperoleh. Pendapatan hibah berupa uang diakui pada saat diterima kas BLUD RSUD PROF.DR.H.M.ANWAR MAKKATUTU dan dicatat sebesar jumlah kas yang diterima BLUD RSUD PROF.DR.H.M.ANWAR MAKKATUTU Kabupaten Bantaeng Propinsi Sulawesi Selatan.

3. Pendapatan APBD dan APBN

Pendapatan dari APBD dan APBN diakui pada saat pengeluaran belanja dipertanggungjawabkan dengan diterbitkannya SP2D. Pendapatan dari APBD dan APBN dicatat sebesar nilai pengeluaran bruto belanja pada SPM.

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF.DR.H.M.ANWAR MAKKATUTU
CATATAN LAPORAN KEUANGAN
PER '31 DESEMBER 2016
(Disajikan dalam rupiah)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

4. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan yang berasal selain dari kegiatan pelayanan, yaitu dari hasil kerjasama dengan pihak ketiga:

- KSO (Kerja Sama Operasi), Pendapatan Bagi Hasil atau Bagi Pendapatan atau bentuk lain, diakui pada saat menjadi hal BLUD RSUD PROF.DR.H.M.ANWAR MAKKATUTU.
- Pengendalian Bersama Operasi/Aset, pendapatan diakui sebesar porsi yang menjadi hak BLUD RSUD PROF.DR.H.M.ANWAR MAKKATUTU. Porsi mitra yang diterima BLUD RSUD PROF.DR.H.M.ANWAR MAKKATUTU diakui sebagai kewajiban.

Beban BLUD RSUD PROF.DR.H.M.ANWAR MAKKATUTU diklasifikasikan ke dalam: Beban Layanan, Beban Umum & Administrasi, Beban Lainnya, Keuntungan (Kerugian) Penjualan Aset Non Lancar, Kerugian Penurunan Nilai dan Keuntungan (Kerugian) Lainnya.

Beban diakui pada saat timbulnya beban tersebut sebesar jumlah yang digunakan untuk kegiatan di BLUD RSUD PROF.DR.H.M.ANWAR MAKKATUTU, jumlah yang telah dibayar, jumlah yang harus dibayar, jumlah yang diestimasi atau sebesar jumlah yang dialokasikan. Terhadap beban-beban yang tidak dapat diidentifikasi kesalahan satu kelompok beban secara pasti, beban yang masih harus dibayar, diestimasi atau dialokasikan diakui pada saat penyesuaian diakhir periode pelaporan.

PENJELASAN POS-POS NERACA DAN LABA RUGI

3. KAS DAN SETARA KAS

2016

Terdiri dari :

- Kas Bendahara Penerimaan	5.093.687
- Kas Bendahara Pengeluaran BLUD	8.842.300
- Bank Rakyat Indonesia	56.802.401
Jumlah Kas dan Setara Kas	70.738.388

4. PIUTANG USAHA

2016

Terdiri dari:

- Piutang Pasien BPJS	4.541.049.143
- Piutang Pasien Jamkesda	606.959.905
Jumlah	5.148.009.048

- Piutang BPJS Oktober 2016	247.878.400
- Piutang BPJS November 2016	2.084.474.800
- Piutang Medis & Non Medis BPJS Desember 2016	2.208.695.943
Jumlah	4.541.049.143

RSUD Prof.dr.H.M Anwar Makatutu
Kab. Bantaeng
Sulawesi Selatan

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF.DR.H.M.ANWAR MAKKATUTU
CATATAN LAPORAN KEUANGAN
PER '31 DESEMBER 2016
(Disajikan dalam rupiah)

4. PIUTANG USAHA (Lanjutan)	
- Piutang Jamkesda November 2016	391.988.527
- Piutang Jamkesda Desember 2016	214.971.378
Jumlah	<u><u>606.959.905</u></u>
5. PERSEDIAAN	
	<u>2016</u>
Terdiri dari :	
- Persediaan Obat-obatan	803.573.144
- Persediaan Bahan / Alat Kesehatan Habis Pakai	748.712.402
- Persediaan O2	5.544.000
- Persediaan ATK	39.848.270
- Persediaan Barang Cetak	18.009.900
- Persediaan Bahan Kering	7.621.250
- Persediaan Alat/Bahan Kebersihan	20.745.159
- Persediaan Bahan Komponen Listrik dan Elektronik	11.209.079
- Persediaan Kantong Plastik/Plastik Kemasan Obat	10.974.920
- Persediaan Perlengkapan Dapur	196.680
- Persediaan Alat Teknik Bangunan	4.534.920
- Persediaan Kantong Darah	26.000.000
Jumlah Persediaan	<u><u>1.696.969.724</u></u>
6. ASET TETAP	
	<u>2016</u>
Harga Perolehan	
- Tanah	-
- Gedung dan Bangunan	65.318.401.321
- Peralatan dan Mesin	54.203.478.185
- Jalan, Irigasi, dan Jembatan	223.620.100
Jumlah	<u><u>119.745.499.606</u></u>
Catatan Aset Tetap Terdiri dari :	
1. Tanah	
- Tanah APBD	-
- Tanah BLUD	-
	-
2. Gedung dan Bangunan	
- Gedung dan Bangunan APBD	65.318.401.321
- Gedung dan Bangunan BLUD	-
	<u><u>65.318.401.321</u></u>
3. Peralatan dan Mesin	
- Peralatan dan Mesin APBD	52.884.935.188
- Peralatan dan Mesin BLUD	1.318.542.997
	<u><u>54.203.478.185</u></u>

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF.DR.H.M.ANWAR MAKKATUTU
CATATAN LAPORAN KEUANGAN
PER '31 DESEMBER 2016
(Disajikan dalam rupiah)

6. ASET TETAP (Lanjutan)	
4. Jalan, Irigasi, dan Jembatan	
- Jalan, Irigasi, dan Jembatan APBD	223.620.100
- Jalan, Irigasi, dan Jembatan BLUD	-
	<u>223.620.100</u>
Akumulasi Penyusutan	
- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	722.294.636
- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	8.202.611.757
- Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jembatan	9.155.115
Jumlah	<u>8.934.061.508</u>
Nilai Buku	
- Tanah	-
- Gedung dan Bangunan	64.596.106.685
- Peralatan dan Mesin	46.000.866.428
- Jalan, Irigasi, dan Jembatan	214.464.985
Jumlah	<u>110.811.438.098</u>
7. ASET LAINNYA	
Terdiri dari:	
- Aset Lain < Rp.500.000,-	18.779.030
- Aset Tidak Berwujud	214.800.000
Jumlah	<u>233.579.030</u>
8. HUTANG USAHA	
2016	
Terdiri dari:	
- Hutang Obat	1.142.147.493
- Hutang BHP	638.702.397
- Hutang Oksigen	44.605.000
- Hutang BMK	54.124.000
Jumlah	<u>1.879.578.890</u>

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF.DR.H.M.ANWAR MAKKATUTU
CATATAN LAPORAN KEUANGAN
PER '31 DESEMBER 2016
(Disajikan dalam rupiah)

9. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	2016
- Biaya Jasa Pelayanan JKD November	173.742.198
- Biaya Jasa Pelayanan JKD Desember	109.297.169
- Biaya Jasa Pelayanan Medis & Non Medis BPJS Oktober	130.966.334
- Biaya Jasa Pelayanan Medis & Non Medis BPJS November	1.071.668.600
- Biaya Jasa Pelayanan Medis & Non Medis BPJS Desember	1.091.915.650
- Biaya Jasa Pelayanan Umum	794.906.866
Jumlah	3.372.496.817
10. EKUITAS TIDAK TERIKAT	2016
Terdiri dari:	
- Ekuitas Awal	47.702.885.096
- Surplus (Defisit) Tahun Lalu	-
- Surplus (Defisit) Tahun Berjalan	65.005.773.486
Jumlah	112.708.658.582
11. PENDAPATAN DAN BEBAN BLUD	2016
a. PENDAPATAN USAHA	
Terdiri dari:	
- Pendapatan Umum	
- Pendapatan IGD Umum	306.123.866
- Pendapatan Rawat Jalan Umum	632.592.223
- Pendapatan Instalasi Rawat Inap Umum	1.941.360.222
- Pendapatan Kamar Operasi Umum	202.131.004
- Pendapatan Fisioterapi Umum	7.825.000
- Pendapatan Laboratorium Umum	343.748.171
- Pendapatan Radiologi Umum	193.644.910
- Pendapatan Instalasi Tranfusi Darah Umum	91.561.707
- Pend. Penjualan Obat & BHP Farmasi Umum	1.574.113.614
- Pendapatan Ambulance Umum	78.594.937
- Pendapatan Pendaftaran Pasien	58.417.250
- Pendapatan Keterangan Kesehatan	42.326.500
- Pendapatan Keterangan Narkoba	2.830.000
- Pendapatan Diklat	165.251.000
- Pendapatan Lainnya	7.796.000
Jumlah Pendapatan Umum	5.648.316.404

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF.DR.H.M.ANWAR MAKKATUTU
CATATAN LAPORAN KEUANGAN
PER '31 DESEMBER 2016
(Disajikan dalam rupiah)

a. PENDAPATAN USAHA (Lanjutan)	
- Pendapatan Jamkesda	
- Pendapatan Instalasi Rawat Inap Jamkesda	1.492.096.714
- Pendapatan Kamar Operasi Jamkesda	106.268.653
- Pendapatan Laboratorium Jamkesda	1.515.500
- Pendapatan Radiologi Jamkesda	800.000
Jumlah Pendapatan Jamkesda	1.600.680.867
- Pendapatan BPJS	
- Pendapatan Instalasi Rawat Jalan BPJS	2.730.007.750
- Pendapatan Instalasi Rawat Inap BPJS	25.512.158.762
- Pend. Penjualan Obat & BHP Farmasi BPJS	2.000.000
- Pendapatan Ambulance BPJS	209.602.601
Jumlah Pendapatan BPJS	28.453.769.113
- Pendapatan Jasa Raharja	
- Pendapatan Instalasi Rawat Jalan Pihak Ke III	89.836.059
- Pendapatan Asuransi Jiwa/In heath	
Pendapatan Kamar Operasi Pihak Ke III	8.185.174
JUMLAH PENDAPATAN BLUD	35.800.787.617
b. PENDAPATAN LAIN-LAIN BLUD	
	2016
Terdiri dari:	
- Pendapatan Jasa Giro	16.549.701
Jumlah	16.549.701
c. BEBAN BLUD	
	2016
Terdiri dari:	
BEBAN OPERASIONAL LAYANAN BLUD	
- Beban Honorarium	186.088.000
- Beban Lembur	30.684.000
- Beban Pemakaian Obat obatan	6.352.018.977
- Beban Pemakaian Bahan/Alkes Pakai Habis	5.319.051.006
- Beban Bahan Makanan Basah Pasien	570.531.000
- Beban Bahan Gas Elpiji	25.085.000
- Beban Pemakaian Bahan Makanan Kering	217.435.250
- Beban Bahan Bakar Minyak	33.996.998
- Beban Pembelian Linen Rumah Sakit	63.132.500
- Beban Pemakaian Komponen Listrik dan Elektronik	26.161.988
- Beban Pemakaian Bahan/Alat Kebersihan Rumah Sakit	114.189.684
- Beban Pemakaian Oksigen (O2)	263.043.000
- Beban Pemakaian Perangko dan Materai	10.935.000
- Beban Pemakaian Plastik/Plastik Kemasan obat	28.697.200
- Beban pemakaian Kantong Darah	296.500.000

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF.DR.H.M.ANWAR MAKKATUTU
CATATAN LAPORAN KEUANGAN
PER '31 DESEMBER 2016
(Disajikan dalam rupiah)

BEBAN OPERASIONAL LAYANAN BLUD (Lanjutan)

- Beban Jasa Pelayanan Medik dan Non Medik	13.526.468.896
- Beban Jasa Pendidikan	157.099.600
- Beban Pelayanan Ambulance	215.036.000
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Medik	103.535.000
- Pemeliharaan Mobil Ambulance/Mobil Jenazah	50.903.350
- Pemeliharaan Bangunan/ Gedung Rumah Sakit	135.805.000
- Pemeliharaan Kalibrasi	81.718.582
- Beban Distribusi Sampah/Septic Tank	6.500.000
- Beban Jasa Transportasi dan Akomodasi	6.270.000
- Beban Jasa Tenaga Ahli/narasumber	11.880.000
- Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.730.000
- Beban Jasa Kantor	16.000.000
- Beban Pemakaian Perlengkapan Dapur	39.300.220
- Beban Pajak Bumi dan Bangunan	635.739
- Beban Pelayanan Lainnya	73.992.622
Jumlah	27.965.424.612

d. BEBAN ADM & UMUM BLUD

- Beban Pemakaian Alat Tulis Kantor	130.684.747
- Beban Pemakaian Cetakan	309.606.600
- Beban Penggandaan	33.335.850
- Beban Langganan media cetak dan elektronik / wifi	41.282.697
- Beban makanan dan minuman pegawai	106.043.450
- Beban Surat Menyurat/ekspedisi	3.964.710
- Beban Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Non Medik	19.406.000
- Beban Pemeliharaan Kendaraan Operasional	27.473.580
- Beban Pemeliharaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	22.860.700
- Beban Bimbingan Teknis	78.806.000
- Beban Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.754.550
- Beban Alat-Alat Listrik	7.798.980
- Beban Sewa penginapan	986.000
- Beban Kontrakan Rumah Dokter Ahli	5.568.700
- Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	143.293.912
- Beban Penyusutan Mesin dan Peralatan	1.668.821.033
- Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.187.955
- Beban Perjalanan Dinas	318.777.100
- Beban Pendidikan & Pelatihan Formal	53.596.800
- Beban Administrasi Bank	455.000
Jumlah	3.015.704.364

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF.DR.H.M.ANWAR MAKKATUTU
CATATAN LAPORAN KEUANGAN
 PER '31 DESEMBER 2016
(Disajikan dalam rupiah)

e. BEBAN LAIN-LAIN BLUD	
- Beban Bunga	4.137.425
Jumlah	4.137.425
<hr/>	
12. PENDAPATAN DAN BEBAN APBD	2016
PENDAPATAN	
Terdiri dari:	
- Pendapatan Operasional APBD	25.681.798.786
- pendapatan Investasi APBD	60.173.702.569
Jumlah	85.855.501.355
<hr/>	
BEBAN APBD	
Terdiri dari:	
BELANJA OPERASI APBD	
- Beban Belanja Pegawai	12.522.458.182
- Beban Belanja Barang dan Jasa	13.159.340.604
Jumlah	25.681.798.786
<hr/>	

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF.DR.H.M.ANWAR MAKKATUTU
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016

(Disajikan dalam rupiah)

	<u>2016</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
Arus Masuk	
- Pendapatan IGD Umum	428.847.238,00
- Pendapatan Instalasi Rawat Jalan Umum	885.887.600,00
- Pendapatan Instalasi Rawat Jalan Pihak Ke III	1.032.213.193,00
- Pendapatan Instalasi Rawat Jalan BPJS	3.334.879.948,00
- Pendapatan Instalasi Rawat Inap Umum	2.718.697.583,00
- Pendapatan Instalasi Rawat Inap BPJS	18.566.470.800,00
- Pendapatan Instalasi Rawat Inap Pihak ke III	215.089.032,00
- Pendapatan Instalasi Rawat Inap Jamkesda	3.924.704.475,00
- Pendapatan Kamar Operasi Umum	283.066.000,00
- Pendapatan Kamar Operasi Jamkesda	106.268.653,00
- Pendapatan Kamar Operasi Pihak ke III	12.012.000,00
- Pendapatan Fisioterapi Umum	7.825.000,00
- Pendapatan Laboratorium Umum	481.387.900,00
- Pendapatan Laboratorium Jamkesda	1.515.500,00
- Pendapatan Laboratorium Pihak ke III	270.000,00
- Pendapatan Radiologi Umum	271.182.000,00
- Pendapatan Radiologi Jamkesda	800.000,00
- Pendapatan Radiologi Pihak ke III	415.000,00
- Pendapatan Instalasi Transfusi Darah Umum	128.223.803,00
- Pendapatan Instalasi Transfusi Darah Pihak ke III	1.000.000,00
- Pend. Penjualan Obat & BHP Farmasi Umum	2.204.402.268,00
- Pend. Penjualan Obat & BHP Farmasi Pihak ke III	575.358.123,00
- Pend. Penjualan Obat & BHP Farmasi BPJS	2.000.000,00
- Pendapatan Ambulance Umum	110.065.027,00
- Pendapatan Ambulance Pihak ke III	27.555.548,00
- Pendapatan Ambulance BPJS	209.602.601,00
- Pendapatan Pendaftaran Pasien	58.417.250,00
- Pendapatan Keterangan Kesehatan	42.326.500,00
- Pendapatan Keterangan Narkoba	2.830.000,00
- Pendapatan Diklat	165.251.000,00
- Pendapatan Bunga Bank	20.687.126,00
- Pendapatan Lainnya	7.796.000,00
- Pendapatan Operasional APBD	25.681.798.786,00
- Pendapatan Investasi APBD	60.173.702.569,00
- Hutang Usaha	1.816.467.382,00
- Biaya Yang Masih Harus Dibayar	3.058.971.616,00
Jumlah Arus Masuk dari Aktivitas Operasi	<u>126.557.987.521,00</u>
Arus Keluar	

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF.DR.H.M.ANWAR MAKATUTU
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016

(Disajikan dalam rupiah)

	2016
- Beban Honorarium	186.088.000,00
- Beban Lembur	30.684.000,00
- Beban Pemakaian Obat obatan	6.352.018.977,00
- Beban Pemakaian Bahan/Alkes Pakai Habis	5.319.051.006,00
- Beban Bahan Makanan Basah Pasien	570.531.000,00
- Beban Bahan Gas Elpiji	28.805.000,00
- Beban Pemakaian Bahan Makanan Kering	290.164.500,00
- Beban Bahan Bakar Minyak	33.996.998,00
- Beban Pembelian Linen Rumah Sakit	63.132.500,00
- Beban Pemakaian Komponen Listrik dan Elektronik	70.652.936,00
- Beban Pemakaian Bahan/Alat Kebersihan Rumah Sakit	160.490.966,00
- Beban Pemakaian Oksigen (O2)	263.043.000,00
- Beban Pemakaian Perangko dan Materai	10.935.000,00
- Beban Pemakaian Plastik/Plastik Kemasan obat	22.593.580,00
- Beban pemakaian Darah	296.500.000,00
- Beban Bahan Reagen Laboratorium	162.024.086,00
- Beban Bahan Kantong Darah	12.900.000,00
- Beban Jasa Pelayanan Medik dan Non Medik	17.482.178.788,00
- Beban Jasa Pendidikan	157.099.600,00
- Beban Pelayanan Ambulance	215.036.000,00
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Medik	103.845.000,00
- Pemeliharaan Mobil Ambulance/Mobil Jenazah	50.903.350,00
- Pemeliharaan Bangunan/ Gedung Rumah Sakit	218.551.400,00
- Pemeliharaan Kalibrasi	81.718.582,00
- Beban Distribusi Sampah/Septic Tank	6.500.000,00
- Beban Jasa Transportasi dan Akomodasi	6.270.000,00
- Beban Jasa Tenaga Ahli/narasumber	11.880.000,00
- Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.730.000,00
- Beban Jasa Kantor	16.000.000,00
- Beban Pemakaian Perlengkapan Dapur	50.708.020,00
- Beban Pajak Bumi dan Bangunan	635.739,00
- Beban Pelayanan Lainnya	73.992.622,00
- Beban Pemakaian Alat Tulis Kantor	127.410.410,00
- Beban Pemakaian Cetakan	382.175.100,00
- Beban Alat Teknik Bangunan	4.840.780,00
- Beban Penggandaan	33.335.850,00
- Beban Langganan media cetak dan elektronik / wifi	41.782.697,00
- Beban makanan dan minuman pegawai	106.043.450,00
- Beban Surat Menyurat/ekspedisi	3.964.710,00
- Beban Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Non Medik	19.656.000,00
- Beban Pemeliharaan Kendaraan Operasional	27.473.580,00

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF.DR.H.M.ANWAR MAKKATUTU
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016

(Disajikan dalam rupiah)

	2016
- Beban Pemeliharaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	22.345.700,00
- Beban Bimbingan Teknis	78.806.000,00
- Beban Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.661.100,00
- Beban Sewa penginapan	986.000,00
- Beban Kontrakan Rumah Dokter Ahli	5.568.700,00
- Beban Perjalanan Dinas	318.777.100,00
- Beban Pendidikan & Pelatihan Formal	53.596.800,00
- Beban Administrasi Bank	455.000,00
- Beban Bunga	4.137.425,00
- Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	143.293.912,00
- Beban Penyusutan Mesin dan Peralatan	1.668.821.033,00
- Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.187.955,00
- Beban Belanja Pegawai	12.522.458.182,00
- Beban Belanja Barang dan Jasa	13.159.340.604,00
- Piutang Pasien BPJS	4.541.049.143,00
- Piutang Pasien Jamkesda	606.959.905,00
- Persediaan Obat-obatan	803.573.144,00
- Persediaan Bahan / Alat Kesehatan Habis Pakai	748.712.402,14
- Persediaan O2	5.544.000,00
- Persediaan ATK	39.848.270,00
- Persediaan Barang Cetakan	18.009.900,00
- Persediaan Bahan Kering	7.621.250,00
- Persediaan Alat/Bahan Kebersihan	20.745.159,00
- Persediaan Bahan Komponen Listrik dan Elektronik	11.209.079,00
- Persediaan Kantong Plastik/Plastik Kemasan Obat	10.974.920,00
- Persediaan Perlengkapan Dapur	196.680,00
- Persediaan Alat Tehnik Bangunan	4.534.920,00
- Persediaan Darah	26.000.000,00
Jumlah Arus Keluar dari Aktivitas Operasi	67.944.757.510,14
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	
Arus Masuk	
-	-
Jumlah Arus Masuk dari Aktivitas Investasi	-
Arus Keluar	
- Gedung dan Bangunan APBD	64.596.106.685,00
- Gedung dan Bangunan BLUD	-
- Peralatan dan Mesin APBD	44.682.323.431,42
- Peralatan dan Mesin BLUD	1.318.542.997,00
- Jalan, Irigasi, dan Jembatan APBD	214.464.985,00
- Jalan, Irigasi, dan Jembatan BLUD	-

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF.DR.H.M.ANWAR MAKKATUTU
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016

(Disajikan dalam rupiah)

	2016
- Aset Lain < Rp.500.000,-	18.779.030,00
- Aset Tidak Berwujud	214.800.000,00
Jumlah Arus Keluar dari Aktivitas Investasi	111.045.017.128,42
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(111.045.017.128,42)

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF.DR.H.M.ANWAR MAKKATUTU
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016

(Disajikan dalam rupiah)

	<u>2016</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	
Arus Masuk	
- Ekuitas Awal	52.502.525.505,56
Jumlah Arus Masuk dari Aktivitas Pendanaan	<u>52.502.525.505,56</u>
Arus keluar	
-	-
Jumlah Arus Keluar dari Aktivitas Pendanaan	<u>-</u>
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	<u>52.502.525.505,56</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SETARA KAS	70.738.388,00
KAS DAN SETARA KAS AWAL	-
KAS DAN SETARA KAS AKHIR	<u><u>70.738.388,00</u></u>

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

RIWAYAT HIDUP



Nurifda Zakina, berasal dari kota Butta Toa atau biasa di kenal sebagai kota Bantaeng tepatnya penulis dilahirkan di Bantaeng pada tanggal 30 juli 1995, adalah anak Pertama dari satu bersaudara dan merupakan buah kasih sayang dari pasangan Arifuddin dan ST. Ramlah. Penulis mulai masuk kejenjang Pendidikan Dasar pada tahun 2001 dan tamat tahun 2007 di SD Inpres No. 5 Lembang Cina Kabupaten Bantaeng dan melanjutkan jenjang pendidikan di SMP Negeri 1 Bantaeng tahun 2007 dan tamat pada tahun 2010, Kemudian melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Bantaeng tahun 2010 dan tamat pada tahun 2013. Pada tahun 2013, penulis melanjutkan pendidikan pada program studi S1 Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Makassar sampai sekarang.